



PROFIL DESA DESA SENI DAN BUDAYA DESA PELIATAN

DESA	: PELIATAN
KECAMATAN	: UBUD
KABUPATEN	: GIANYAR
PROVINSI	: BALI
BULAN	: DESEMBER
TAHUN	: 2024

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN :

1. RPJMDES DESA PELIATAN
2. APBDES 2024 DESA PELIATAN
3. PEMERINTAHAN DESA, LEMBAGA DINAS DAN LEMBAGA ADAT YANG ADA
4. MASYARAKAT DESA PELIATAN



LAMBANG DESA PELIATAN



Arti Umum

- ❖ **Segi Lima** melambangkan Pancasila, dasar negara Republik Indonesia
- ❖ **Bintang** berwarna kuning melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- ❖ **Padi dan Kapas** melambangkan kesuburan
- ❖ **Candi Bentar** melambangkan kesatuan Daerah Propinsi Bali

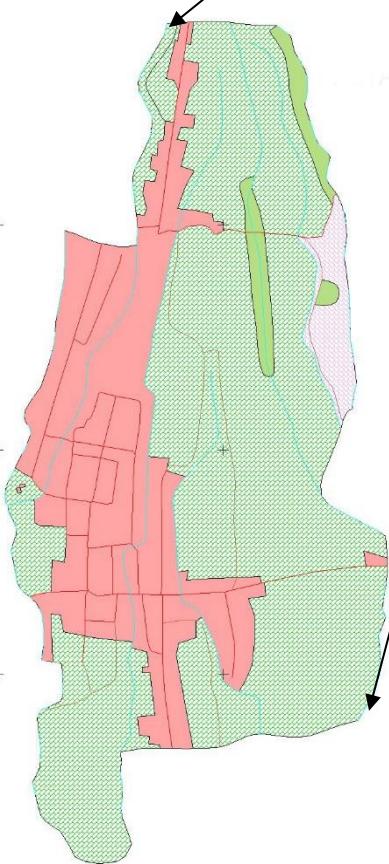
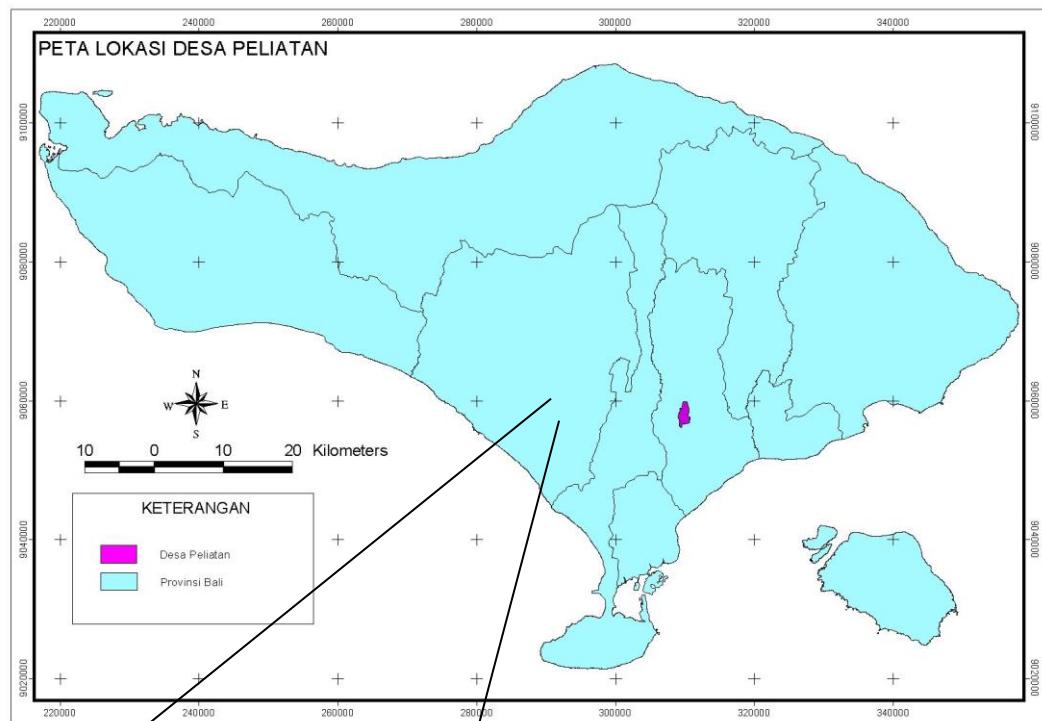
Arti Khusus

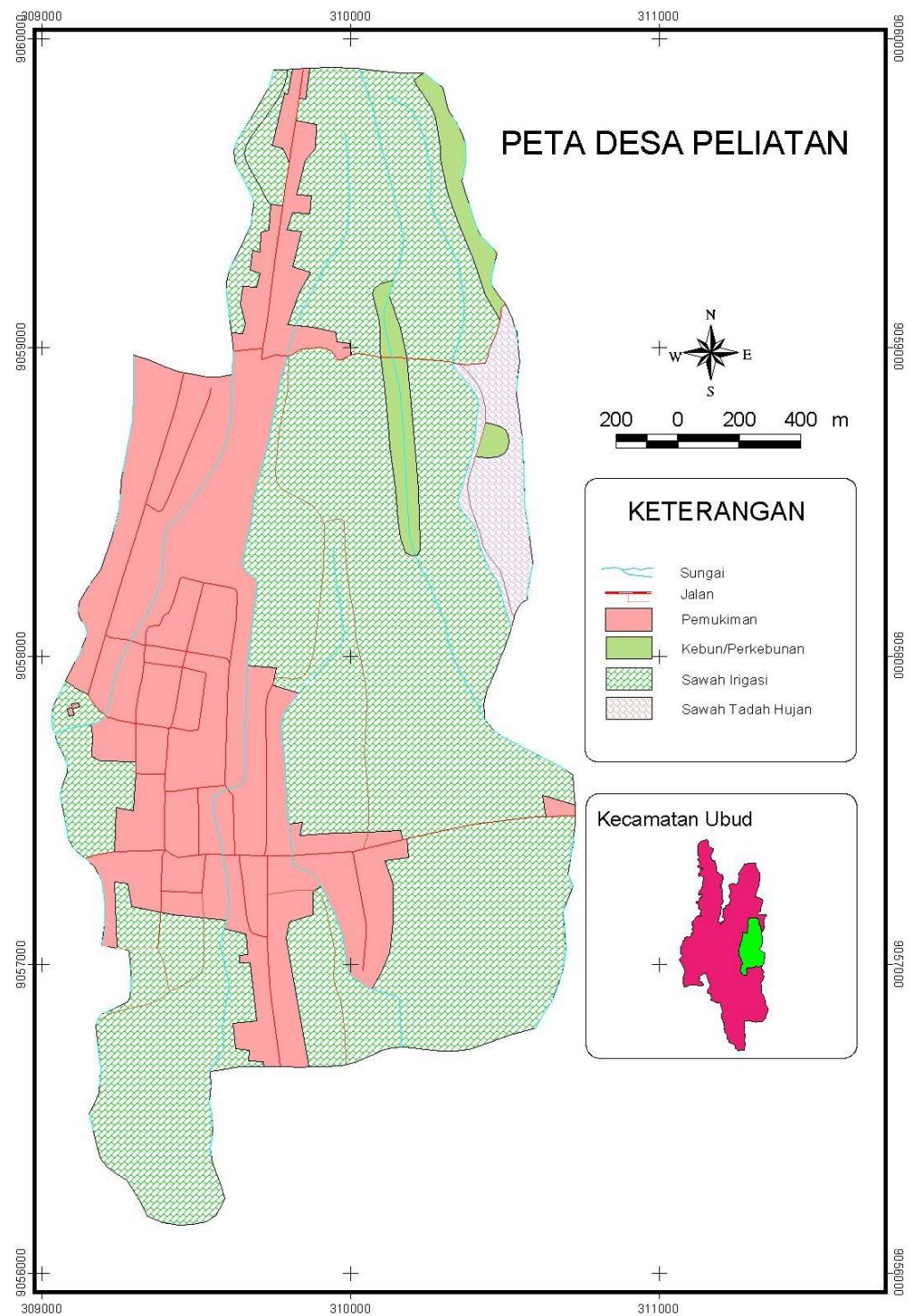
- ❖ **Mata sedang melihat**, mencerminkan sejarah keberadaan nama Desa Peliatan
- ❖ **Tari Legong**, salah satu kesenian khas yang terkenal di Desa Peliatan
- ❖ **Pahat dan Kuwas**, lambang seni pahat dan lukis merupakan dua bentuk karya seni yang telah membudaya di Desa Peliatan.
- ❖ **Sepuluh buah rantai bersatu**, melambangkan sepuluh dusun/banjar yang bersatu mendukung pembangunan di Desa Peliatan
- ❖ **Motto Kriyādwaya Prajā Kr̥ta**, bermakna dengan kesungguhan hati masyarakat Desa Peliatan menuju kebahagiaan dan ketenteraman lahir dan bathin.

Arti Keseluruhan

Desa Peliatan lewat potensi olah seninya berjuang dengan kesungguhan hati mewujudkan masyarakat Peliatan yang tenteram dan bahagia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

PETA LOKASI DESA PELIATAN





VISI DAN MISI

1. Visi dan Misi

1.1 Berdasarkan permasalahan dan potensi dominan yang dimiliki, isu-isu strategis dan analisis strategis, visi desa Peliatan lima (5) tahun kedepan adalah :

“Berdasarkan Tri Hita Karana, Serta Desa Seni dan Budaya Berwawasan Global, Menuju Masyarakat Peliatan Sejahtera”

2. Misi Desa Peliatan

1.2 Misi pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Desa Peliatan adalah sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan pariwisata dan seni budaya Desa Peliatan.
2. Meningkatkan Pendidikan yang berkarakter muatan lokal budaya dan teknologi menuju generasi emas Peliatan.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha masyarakat Desa Peliatan.
4. Terciptanya pelayanan kesehatan yang terpadu untuk mengedepankan pelayanan umum bagi masyarakat Desa Peliatan
5. Meningkatkan pembangunan infrastuktur yang berkearifan lokal sesuai dengan perkembangan seni dan budaya Desa Peliatan.
6. Menciptakan keamanan serta ketertiban dengan mengedepankan pendekatan aturan yang persuasif.
7. Menciptakan generasi emas Desa Peliatan yang berprestasi melalui pembinaan organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Atas asung kertha waranugraha Ida Sang Hyang Widdhi Waśa maka Profile Desa, Desa Peliatan dapat kami susun sesuai dengan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, sehingga perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa Peliatan.

Profile Desa ini adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi: data dasar, potensi, capaian pelaksanaan dan program kegiatan, dan masalah yang dihadapi. Profile ini adalah status laporan dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, dan pemerintahan desa serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Desa Peliatan masih bisa melaksanakan pembangunan walaupun dengan berbagai perubahan perubahan sesuai dengan anggaran dan prioritas pembangunan.

Penyusunan Profile Desa ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya partisipasi dan motivasi yang kuat dari berbagai pihak. Untuk itu kiranya tidak berlebihan bila kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Para pemegang kebijakan dan para stake holder di Desa Peliatan, serta seluruh warga masyarakat Desa Peliatan. Harapan kami semoga profile Pemerintahan Desa Peliatan ini dapat dimanfaatkan dalam rangka menyediakan data dan informasi yang akurat tentang potensi dan dinamika pelaksanaan pembangunan di Desa Peliatan.

Om Šantih, Šantih, Šantih, Om



I Made Dwi Sutaryanta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan pembangunan di tingkat basis yang sangat sarat dengan berbagai permasalahan yang menyangkut permasalahan sosial, budaya, adat istiadat, serta permasalahan pemerintahan secara adati, kedinasan daerah maupun nasional. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas didalam mengelola daerahnya termasuk didalam pengelolaan sumberdaya alam dan potensi daerahnya. Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sangat dipandang perlu melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan segala potensi sumberdaya yang dimiliki desa serta penguatan kelembagaan desa sebagai fungsi koordinatif sehingga upaya memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dapat diawasi dan selalu mengacu kepada konsepsi pembangunan berkelanjutan.

Pemanfaatan sumberdaya desa sangat memerlukan kearifan pemikiran sehingga upaya pembangunan desa yang dilaksanakan dapat diseimbangkan antara kepentingan ekonomis dengan kepentingan sosial-budaya dan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Strategi kebijakan pembangunan desa harus diarahkan agar mampu memberikan peningkatan motivasi, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat desa, memperkuat integritas desa sehingga keberadaan desa dengan segala keunikannya dapat dilestarikan.

Terkait dengan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di Desa Peliatan sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa yang berisikan berbagai informasi tentang rencana dan program pembangunan desa. Dokumen tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri, sekaligus untuk meneliti dan mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa.

Profile Desa adalah gambaran status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa yang penekanannya berada pada pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, lingkungan, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Profile Desa dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang dinamika potensi desa serta untuk mencermati perubahan atau kecendrungan tingkat perkembangan desa sesuai dengan RPJM Desa Dan pelaksanaan APBDES 2024 yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Profile adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan Desa Peliatan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

1.3 Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor : 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah – daerah tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan Daerah pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

6. Permendagri Nomor :113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor :1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Gianyar nomor 1 Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan lembaran daerah kabupaten Gianyar nomor 1).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor :5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018(Lembaran daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 5).
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 76).
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan desa tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 79).
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 77 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor77).
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2017 Nomor 78).
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Gianyar kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 (Berita Dqerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 80).

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA PELIATAN

2.1 Sumber Daya Alam

Desa Peliatan memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sumber pendapatan desa, sumberdaya tersebut apabila tidak dikelola dengan baik (tanpa sentuhan konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan) akan memberikan dampak yang merugikan bagi kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Desa Peliatan dan desa-desa lainnya. Secara geografis Desa Peliatan terletak pada $8^036'30''$ LS dan $115^021'05''$ BT serta pada ketinggian 350 m di atas permukaan laut. Kondisi topografis sumberdaya Desa Peliatan berupa hamparan lahan dataran dengan komposisi dan luasan: sawah = 246 ha; tegalan = 103.76 ha; pekarangan= 25.76 ha, pemukiman = 78.56 ha, kuburan 2.90 ha, dan untuk kepentingan lainnya sebanyak 36.02 ha.

Desa peliatan yang luasnya $4,93 \text{ km}^2$ termasuk wilayah kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar, provinsi Bali dengan batas-batas wilayah:

- Di sebelah utara : Desa Petulu
- Di sebelah barat : Desa Ubud
- Di sebelah selatan : Desa Mas
- Di sebelah timur : Desa Pejeng

Desa Peliatan sebagai daerah tropis mengenal adanya dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada umumnya musim hujan lebih panjang daripada musim kemarau, dengan demikian kebutuhan akan air, untuk pengairan di sawah akan mencukupi. Keberadaan sumber air yakni adanya aliran sungai Petanu dan sungai tawar merupakan sumberdaya untuk memenuhi keperluan pertanian di Desa Peliatan sehingga petani tidak kekurangan air. Desa Peliatan memiliki luas 493 ha terhampar dengan bentang lahan daratan, dikelilingi oleh dua buah sungai sebagai sumber utama pengairan irigasi pertanian maupun untuk kepentingan hidup lainnya. Meskipun ketebalan solum tanah tidak melebihi satu meter, dengan adanya sumber air ini membuat bentang lahan desa Peliatan menjadi lahan subur sehingga sangat potensial bagi usaha pertanian. Untuk meningkatkan konservasi lahan dan air, kuburan dapat dipandang sebagai hutan-hutan kecil atau daerah penangkapan air hujan sehingga fungsinya sebagai penjerap air dapat dilestarikan. Curah hujan tahunan di Desa Peliatan berfluktuasi

tergantung pada musim. Curah hujan yang cukup tinggi tersebut menyebabkan vegetasi lahan pertanian dan pekarangan di Desa Peliatan tetap apik dan lestari.

Desa Peliatan terdiri atas 10 banjar/dusun membentang dari arah utara ke selatan berturut-turut yakni: Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Taruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Teges Kawan, Br. Yangloni, dan Br. Teges Kanginan. Kesepuluh Banjar tersebut hingga saat ini terjalin erat dan selalu ada musyawarah untuk mengambil solusi bersama. Dalam konteks desa pakraman Desa Peliatan terdiri dari Desa Pakraman Peliatan dan



Desa pakraman Teges Kanginan.

Desa Peliatan berupa hamparan lahan daratan dengan komposisi dan luasan: Sawah = 251 ha, Tegalan = 103,76 ha, Pekarangan = 103,56 ha, dan Kuburan = 2,90 ha dan untuk kepentingan lainnya sebanyak 31.78 ha, yang luas keseluruhannya mencapai 49,3. Ha, yang terbagi dalam 10 Banjar

Dinas yang meliputi :

1. Banjar Dinas Tebesaya.
2. Banjar Dinas Ambengan.
3. Banjar Dinas Pande.
4. Banjar Dinas Teruna.
5. Banjar Dinas Tengah Kangin.
6. Banjar Dinas Tengah Kauh.
7. Banjar Dinas Kalah
8. Banjar Dinas Teges Kawan.
9. Banjar Dinas Yangloni.
10. Banjar Dinas Teges Kanginan.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dari Segi Demografi Jumlah Penduduk Desa Peliatan Tahun 2024 sebanyak 8.404 jiwa dengan rincian Laki - Laki sebanyak = 4.167 Jiwa dan Perempuan sebanyak 4.247 Jiwa yang termasuk dalam 1.898 KK.

Mengenai mata pencaharian Penduduk Desa Peliatan beraneka ragam yang dapat dibagi dalam beberapa sektor diantaranya: bekerja disektor Pertanian, disektor Pariwisata disektor Perdagangan dan Konstruksi disamping itu juga ada sebagai Pegawai Negeri, Karyawan Swasta, TNI / Polri, Pengusaha, Pengrajin, Pelukis dan bergerak dibidang jasa,dll.

A. Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total Penduduk
1	Banjar Tebesaya	703	775	1.478
2	Banjar Ambengan	342	320	662
3	Banjar Pande	269	240	509
4	Banjar Teruna	478	507	985
5	Banjar Tengah Kangin	504	511	1.014
6	Banjar Tengah Kauh	498	520	1.018
7	Banjar Kalah	378	393	770
8	Banjar Teges Kawan	168	171	339
9	Banjar Yangloni	452	449	900
10	Banjar Teges Kanginan	375	348	723
Jumlah		4.167	4.247	8.404

Desa Peliatan terdiri dari 10 banjar berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk keseluruhan sebesar 8.398 diantaranya: Banjar Tebesaya sejumlah 1478, Banjar Ambengan sejumlah 662, Banjar Pande sejumlah 509, Banjar Teruna sejumlah 985, Banjar Tengah Kangin sejumlah 1014, Banjar Tengah Kauh sejumlah 1018, Banjar Kalah sejumlah 770, Banjar Teges Kawan sejumlah 339, Banjar Yangloni sejumlah 900, Banjar Teges Kanginan sejumlah 723.

B. Berikut Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Agama, Pendidikan dan Mata Pencaharian :

Penduduk Berdasarkan Kartu Keluarga

No	Dusun	Jumlah KK
1	Banjar Tebesaya	351
2	Banjar Ambengan	147
3	Banjar Pande	113
4	Banjar Teruna	228
5	Banjar Tengah Kangin	224
6	Banjar Tengah Kauh	224
7	Banjar Kalah	170
8	Banjar Teges Kawan	78
9	Banjar Yangloni	195
10	Banjar Teges Kanginan	168
Jumlah		1.898

Dari Data diatas terdiri dari 10 banjar Desa Peliatan memiliki jumlah penduduk berdasarkan KK sebanyak 1.898.

Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Dusun	Kelompok Umur (Tahun)									Jumlah
		0-4	5-6	7-12	13-15	16-18	19-25	26-55	56-60	60>	
1	Banjar Tebesaya	11	23	98	59	56	169	653	111	298	1478
2	Banjar Ambengan	8	11	70	24	37	69	294	44	105	662
3	Banjar Pande	25	15	42	27	22	51	203	42	81	509
4	Banjar Teruna	46	27	62	38	53	119	419	63	158	985
5	Banjar Tengah Kangin	52	16	63	41	47	131	437	61	166	1014
6	Banjar Tengah Kauh	45	25	86	46	51	94	443	63	165	1018
7	Banjar Kalah	42	16	58	31	42	101	329	41	110	770
8	Banjar Teges Kawan	12	11	22	16	17	41	148	20	52	339
9	Banjar Yangloni	47	20	58	39	40	116	395	59	126	900
10	Banjar Teges Kanginan	64	20	69	35	27	79	313	41	75	723
	Jumlah	352	184	628	356	392	970	3635	545	1336	8.404

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang berada di Desa Peliatan sangat beragam. Dilihat dari segi usia, Desa Peliatan memiliki 8.398 masyarakat yang terdiri dari 10 banjar. Data tersebut diperoleh dari pendataan yang dilakukan dimasing-masing banjar. Masyarakat tersebut dapat dapat dikategorikan dari umur 0-4 tahun (balita) hingga 60 tahun keatas (lansia).

Penduduk Berdasarkan Agama

No	Dusun	Jumlah KK
1	Hindu	8.319
2	Budha	3
3	Islam	58
4	Kristen	10
5	Katolik	8
Jumlah		8.404

Masyarakat Desa Peliatan memiliki agama yang berbeda-beda dapat dilihat Jumlah Penduduk berdasarkan Agama sebesar 8.398 diantaramya meliputi : Agama Hindu sejumlah 8.319 orang, Budha 3 orang, Islam 58 orang, Krsiten 10 orang dan Katolik 8 orang.

Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	447
2	Sedang TK	206
3	Sedang SD/Sederajat	600
4	Tamat SD/Sederajat	1.541
5	Sedang SLTP/Sederajat	369
6	Tamat SLTP/Sederajat	1.256
7	Sedang SLTA/Sederajat	442
8	Tamat SLTA/Sederajat	2.883
9	Sarjana Muda	467
10	Strata I	809
11	Strata II	71
12	Strata III	10

Dalam Tingkat Pendidikan di Desa Peliatan terdapat masyarakat yang belum sekolah sebanyak 447 orang, TK 206 orang, Sedang SD 600 orang, Tamat SD 1.541 orang, Sedang SLTP 369 orang, Tamat SLTP 1.256 orang, Sedang SLTA 442 orang, Tamat SLTA 2.883 orang, Sarjana Muda 467, Strata I 809 orang, Strata II 71 dan Strata III sebanyak 10 orang.

Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	181
2	Peternakan	15
3	Pengrajin	114
4	Industri	208
5	Pedagang	316
6	Pegawai Negeri Sipil	205
7	TNI	10
8	POLRI	24
9	Pensiunan/Purnawirawan	131
10	Pegawai Swasta	1.798
11	Buruh	344
12	Tukang Jarit	31
13	Bengkel	14
14	Lain-lain	2.933

Sesuai tabel diatas penduduk Desa Peliatan sudah banyak memiliki mata pencaharian yang sangat membantu dalam kehidupannya, dapat dipastikan Penduduk Desa Peliatan tidak ada yang menganggur.

2.3 KONDISI EKONOMI.

Dalam Upaya mempercepat terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat UUD 45 kami didesa berupaya terus menyusun program - program yang dituangkan dalam Perencanaan. Pembangunan Desa Bila dikaitkan dengan percepatan kesejahteraan masyarakat, Desa Peliatan dalam Pembangunan dibidang Ekonomi bertumpu pada sektor Pertanian , Perdagangan , dan sector Pariwisata. Hal ini juga telah didukung dengan adanya Sarana dan Prasarana seperti Pasar Desa Peliatan, Kuliner Desa Peliatan sehingga masyarakat bisa memasarkan hasil pertaniannya langsung di pasar.

Desa Peliatan selalu berusaha untuk membuat berbagai upaya pertahanan dibidang ekonomi baik di desa adat maupun di kedinasan. Pelaksanaan bedah rumah, percepatan pembagian BLT, penyaluran BST dan pembagian sembako baik dari desa adat, CSR pihak ke tiga, dari pemerintah dan bantuan bantuan lainnya.

Di Desa Peliatan dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tidak terlepas dari situasi Kepariwisataan Bali Khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan tidak terlepas dari peranan LPD Desa Pekraman Peliatan dan BUMDesa Praja Krta Laksmi Desa Peliatan yang sudah berjalan dengan usaha – usaha ekonomi untuk membantu perkembangan kondisi ekonomi di Desa Peliatan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD)

3.1 VISI DAN MISI

1. Visi Desa Peliatan

Berdasarkan permasalahan dan potensi dominan yang dimiliki, isu-isu strategis dan analisis strategis, visi desa Peliatan lima (5) tahun kedepan adalah :

“Berdasarkan Tri Hita Karana, Serta Desa Seni dan Budaya Berwawasan Global, Menuju Masyarakat Peliatan Sejahtera”

2. Misi Desa Peliatan

Misi pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Desa Peliatan adalah sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan pariwisata dan seni budaya Desa Peliatan.
2. Meningkatkan Pendidikan yang berkarakter muatan lokal budaya dan teknologi menuju generasi emas Peliatan.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha masyarakat Desa Peliatan.
4. Terciptanya pelayanan kesehatan yang terpadu untuk mengedepankan pelayanan umum bagi masyarakat Desa Peliatan.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkearifan lokal sesuai dengan perkembangan seni dan budaya Desa Peliatan.
6. Menciptakan keamanan serta ketertiban dengan mengedepankan pendekatan aturan yang persuasive.
7. Menciptakan generasi emas Desa Peliatan yang berprestasi melalui pembinaan organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif.

3.2 Kebijakan pembangunan

Dalam usaha mewujudkan visi dan Misi desa Peliatan 2019 – 2027, maka diperlukan kebijakan. Kebijakan ini merupakan kerangka program-program desa (Prebekel) dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa merumuskan program-programnya beserta kegiatannya.

Adapun kebijakan pembangunan desa Peliatan 2019 – 2027 adalah sebagai berikut :

3.2.1. KEBIJAKAN BIDANG KESENIAN

3.2.1.1. Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan tersebut diarahkan kepada : Pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya daerah agar dapat dijadikan panduan dan memberikan nilai tambah dalam aktivitas kehidupan masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kesenian di lingkungan sekolah dan masyarakat.

3.2.2. KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN

3.2.2.1 Arah Kebijakan

Perekonomian di Desa Peliatan yang sebagian besar warga bekerja di lingkungan pariwisata, Untuk mendukung kebijakan perbaikan ekonomi tersebut diarahkan kepada : Pengembangan usaha kecil menengah untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif usaha melalui perkoperasian dan lembaga ekonomi perdesaan dengan upaya perlindungan bersama usaha kerakyatan.

3.2.3. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

3.2.3.1. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
2. Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk memwujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu untuk memenuhi hak dasar warga desa.
3. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga desa yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal, bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah.
4. Menyediakan sarana dan prasarana, materi dan peralatan pendidikan .

3.2.4. KEBIJAKAN BIDANG SARANA, PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR

3.2.4.1 Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan tersebut diarahkan kepada : meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan yang bermanfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

3.2.5 KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN

3.2.5.1. Arah Kebijakan

Untuk menjalankan kebijakan tersebut arah pembangunan kesehatan diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas posyandu
2. Memastikan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Peliatan menjangkau penduduk miskin
3. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
4. Stunting
5. Peningkatan tingkat kunjungan untuk memanfaatkan Poskesdes
6. Pembentukan Posyandu Jiwa

3.2.6 KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

3.2.6.1. Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan tersebut diarahkan kepada : peningkatan kualitas keagamaan serta mendorong tumbuhnya bidang sosial dan budaya yang terarah.

3.2.7. KEBIJAKAN BIDANG KEAMANAN

3.2.7.1 Arah Kebijakan

Untuk mengajak masyarakat akan kesadaran ketertiban dan pentingnya keamanan dalam mempertahankan citra pariwisata.

3.2.8. KEBIJAKAN BIDANG DESA ADAT dan SUBAK

3.2.8.1. Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan tersebut diarahkan kepada : peningkatan kualitas Desa Adat dan Subak agar selalu bersinergi dengan Desa Dinas

3.2.9. KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

3.2.9.1 Arah Kebijakan

Mengelola sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya melalui peranserta aktif masyarakat serta untuk kesinambungan sumber daya hayati untuk dimanfaatkan secara lestari.

3.2.10. KEBIJAKAN BIDANG KELEMBAGAAN

3.2.10.1 Arah Kebijakan

Ditujukan kepada pelayanan pada masyarakat yang meliputi semua kepentingan masyarakat.

3.3. PRIORITAS DESA.

Dengan keterbatasan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum desa Peliatan yang dihadapi, termasuk adanya masalah yang segera harus diatasi, maka tidak semua program menjadi prioritas tahunan dalam penuangannya kedalam rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPD) Penuangan Rencana Pembangunan Desa (RKPD) merupakan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebang) yang telah diprioritaskan menurut keperluan yang mendesak berdasarkan kepentingan umum / kepentingan masyarakat. Sebagai penerima predikat IDM terbaik nasional di tahun 2019 dan selalu dalam peringkat 10 besar IDM Nasional di tahun tahun berikutnya maka pembangunan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan dan Budaya adalah prioritas Pembangunan dan bidang bidang lainnya yang dilaksanakan sebagai respon dari usulan usulan Masyarakat yang tertuang dalam RPJM Desa.

B A B IV

INOVASI PEMBANGUNAN DI DESA PELIATAN

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan tugas – tugas Perbekel, Pemerintah Desa bersama - sama dengan BPD bepedoman dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Dalam Undang - undang dan PP tersebut diatur bahwa Pemerintahan Desa adalah suatu kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Sedangkan Pelaksanaan Tugas - tugas Perbekel selama tahun 2024 yang telah berjalan dibagi kedalam 3 (tiga) bidang tugas - tugas yaitu :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Didalam menjalankan tugas, kewajiban dan kegiatan dibidang Pemerintahan Desa Perbekel melaksanakannya bersama- sama dengan BPD. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa ini mengandung konsep Otonomi Desa, yaitu berhubungan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri dibidang anggaran dan pemerintahan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa diberikan kewenangan didalam menggali potensi – potensi yang ada di Desanya, untuk dijadikan sumber pendapatan didalam penyusunan anggarannya dan menyusun peraturan Desa yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat warga masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Keleluasaan Pemerintahan Desa untuk memperkuat struktur pendapatannya, sangat dibatasi oleh undang - undang yang mengharapkan terhadap pengenaan pajak dan retribusi ganda. Misalnya jika suatu usaha sudah dikenakan pajak atau Retribusi oleh Pemerintah daerah / pusat maka pemerintah Desa tidak boleh lagi mengenakan pajak dan retribusi terhadap usaha tersebut.

Sedangkan didalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, suatu kebijakan dan keputusan yang kami keluarkan. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan Desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa juga meliputi bidang kemasyarakatan yaitu Pelayanan Umum kepada masyarakat khususnya pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan Umum kepada masyarakat itu didalamnya juga termasuk mendamaikan perselisihan masyarakat dan mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan termasuk jika ada panggilan dari pihak Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban masyarakat.

Didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendamaikan Perselisihan masyarakat, sesuai amanat peraturan , kami selaku Perbekel wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini telah kami laksanakan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai amanat peraturan daerah, juga termasuk melaksanakan pendataan penduduk.

Pendataan Penduduk ini kami bebankan kepada Perangkat Desa, khususnya Pelaksana teknis Operasional Wilayah yaitu para kelian Banjar Dinas yang dilaksanakan secara periodic dengan melaporkan

tiap - tiap bulan adanya penduduk yang lahir, mati datang dan pergi di wilayahnya masing - masing.

2. **BIDANG PEMBANGUNAN.**

Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa disesuaikan dengan situasi , kondisi dan kemampuan riil dari Pemerintahan Desa. Selama ini pelaksanaan Pembangunan di Desa Peliatan dilaksanakan dengan Swadaya Masyarakat Desa disamping mengandalkan usulan - usulan Proyek kepada Pemerintah ,yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar tergantung pada kemampuan anggaran Pemerintah baik daerah maupun Pusat yaitu APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN Pusat. Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan di Desa Peliatan, Perbekel dibantu oleh Lembaga yang ada di Desa spt : BPD, LKMD, serta Kelian Banjar Dinas, merumuskan Usulan- usulan proyek dan dibahas bersama- sama berdasarkan aspirasi - aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dberdasarkan kebutuhan - kebutuhan serta situasi dan kondisi. Usulan- usulan tersebut kami bahas dan rumuskan melalui Musrenbangdes yaitu Musyawarah rencana Pembangunan Desa yang akan kami ajukan ketingkat kecamatan. Ditingkat kecamatan usulan - usulan tersebut dibahas dalam Temu Karya Pembangun bersama - sama dengan Perbekel, ketua LPM, Ketua TP. PKK Desa, Anggota DPRD yang berasal dari Desa Masing - masing , dan rapat temu karya tersebut dipimpin oleh Bapak Camat Ubud bersama – sama dengan tim dari Kabupaten yang dikoordinir oleh Bappeda. Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan,demi terciptanya masyarakat yang mandiri dan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat secara luas pendanaan pembangunan diarahkan pada swadaya murni masyarakat.

3. **BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**

Perbekel beserta perangkatnya dan BPD melaksanakan dan mengamankan keputusan – keputusan politik, Kebijakan – kebijakan dan instruksi - intruksi Pemerintah baik pusat maupun daerah disegala aspek kehidupan yang rumuskan kedalam Poleksosbud Hankam yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya serta Pertahanan dan Keamanan.

Pemerintahan Desa wajib melaksanakan hal - hal tersebut diatas karena merupakan perwujudan dari kepanjangan tangan Pemerintah di Desa. Selaku Perbekel selain melaksanakan Peraturan dan Keputusan Desa, juga melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan pelimpahan tugas dan instruksi – instruksi dari Pemerintah Kabupaten baik secara langsung dari Bupati maupun melalui Pemerintah Kecamatan , Dinas - Dinas dan Bagian – Bagian di Sekretariat Kabupaten. Selain melaksanakan tugas - tugas dan instruksi - instruksi dari Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan tugas- tugas dari Propinsi dan Pusat tentunya melalui Pemerintah Kabupaten. Hal ini merupakan tugas - tugas yang bersifat Vertikal. Pengawasan terhadap Perbekel secara Vertikal dilaksanakan oleh Bupati, sedangkan secara Horisontal oleh BPD. Perbekel selain mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan wajib memberikan laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD dan

menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Secara struktural juga harus memberikan pelayanan kepada kebijakan Pemerintah daerah dan Bupati serta memberikan laporan Pertanggung jawaban dan Pelaksanaan tugas - tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Secara Idiologi kita sebagai bangsa dan negara adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara, sebagai idiologi dan filosofi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan dasar acuan didalam menjalankan politik negara dan Pemerintahan adalah UUD 1945.

Di Era reformasi ini, dimana kebebasan politik demikian besarnya, kepentingan politik kelompok semakin menonjol sehingga memperlemah idiologi negara. Oleh karena itu Pemerintah Desa Peliatan tidak boleh lengah terhadap masuknya idiologi - idiologi yang dapat memperlemah sendi - sendi bernegara dan berbangsa. Setiap organisasi dan lembaga yang ada di Desa Peliatan, sepanjang pantauan kami, selalu mencantumkan Pancasila sebagai Dasar dan landasan idiologi didalam menjalankan roda organisasi dan lembaga, termasuk juga Lembaga Adat.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban dari masyarakat Peliatan didalam hidup bernegara sudah cukup memadai demikian juga kesadaran untuk menghormati keputusan - keputusan politik dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pembinaan - Pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini telah dan terus dilaksanakan baik melalui pertemuan - petemuan tatap muka maupun himbauan tidak langsung.

4. EKONOMI.

Di tahun 2024 banyak sudah bebagai kegiatan untuk meunjang peningkatan ekonomi masyarakat yang dilakukan di desa peliatan. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa Peliatan tidak terlepas dari situasi kepariwisataan Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada aspek ini kami lebih menitik beratkan pada penciptaan suasana dan situasi yang kondusif dimasyarakat agar tidak terjadi guncangan - guncangan sosial dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan para wisatawan untuk datang berkunjung ke Desa Peliatan. Di Desa Peliatan juga telah ada LPD yang berkembang dengan pesatnya Serta BUMDes Praja Krta Laksmi yang sangat membantu perekonomia di Desa Peliatan.

5. SOSIAL - BUDAYA.

Kehidupan Sosial masyarakat Desa Peliatan sepanjang Tahun 2024 dapat dikatakan ada pada tingkat yang relatif kondusif, dilihat dari aspek Sosial Budaya, Desa Peliatan terdiri dari 10 Banjar Dinas dan terdiri dari 2 (dua) Desa Pakraman yaitu Desa Pekraman Peliatan dan Desa Pakraman Teges Kanginan.

Situasi Desa kondusif merupakan potensi yang besar untuk melaksanakan pembangunan dan melakukan upaya pelestarian budaya. Namun sebaliknya

hal tersebut dapat menjadi potensi Konflik yang besar pula di masyarakat jika kita lengah untuk melakukan pembinaan - pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena yang sering terjadi khususnya di Kabupaten Gianyar, Konflik bermula dari masalah - masalah adat.

Namun yang menggembirakan para prajuru Adat , Tokoh – tokoh dan masyarakat secara luas di masing - masing Desa Pakraman se - Desa Peliatan memiliki wawasan yang luas, selalu berpikir rasional serta memiliki rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi.

6. KESEHATAN.

Di Bidang Kesehatan, banyak kegiatan yang sudah dilakukan disepanjang tahun 2024. Kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk merawat dan menimbang bayinya melalui POSYANDU. Pihak Puskesmas Ubud I yang wilayah kerjanya meliputi Desa Peliatan selalu melakukan koordinasi dengan kami didalam melakukan pembinaan kesehatan masyarakat. POSKESDES Desa Peliatan yang merupakan barometer Sarana Kesehatan milik Masyarakat Desa Peliatan yang telah di dukung oleh tenaga Medis dan obat obat yang memadai untuk ukuran poskesdes Desa.

7. PENDIDIKAN

Di Bidang Pendidikan, di Desa Peliatan terdapat 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri ,satu Sekolah TK,Satu SMP N 4 Ubud di Peliatan ,dan Satu SMK 3 PGRI UBUD. Untuk Sekolah Dasar yang ada di Desa Peliatan telah diadakan Pembagian wilayah untuk pemerataan penerimaan siswa dari keempat SD tersebut meliputi:

SD .No.1 Peliatan meliputi wilayah Br.Tengah Kangin,dan Br.Kalah, Untuk SD. No.2 Peliatan meliputi Wilayah Banjar Tebesay, tempek kelod, banjar Tengah Kauh, dan Banjar Teruna.Untuk SD No.3 Peliatan meliputi wilayah Banjar Teges Kawan, Banjar Yangloni dan Banjar Teges Kanginan. Untuk SD No. 4 Peliatan meliputi wilayah banjar Tebesaya tempek kaja, Banjar Ambengan dan Banjar Pande. Pelaksanaan dan Pengawasan dilapangan dilakukan oleh kelianbanjar dinas masing - masing se- Desa Peliatan dengan selalu berkoordinasi dengan pihak kepala Sekolah masing-masing SD. Sedangkan untuk Sekolah Taman Kanak - Kanak telah dikelola oleh yayasan dibawah

LKMD / LPM Desa Peliatan dengan nama Yayasan TK Widya Craya yang telah memiliki Gedung dan perlengkapan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

untuk Sekolah SMP dan SMA PGRI juga telah memiliki Gedung sendiri.

8. KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat erat dan berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga sistem keamanan lingkungannya masing-masing serta kesadaran terhadap rasa kekerabatan dan persaudaraan diantara warga masyarakat. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Peliatan selama ini sangat dibantuh oleh peran Desa Pakraman masing - masing melalui bimbingan dan pengarahan dari prajurunya baik prajuru

Kahyangan maupun prajuru Banjar masing - masing yang dibantu oleh Pecalang dan Hansip Desa Peliatan.

Dan untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Sehari - hari, disamping juga ada petugas dari Kepolisian, Desa Peliatan lewat Bankamdes (Bantuan Kemanan Desa Peliatan) juga mengadakan Pospenjagaan secara bergantian dari pagi , Siang dan malam.

Selain papran kegiatan diatas di Desa Peliatan berbagai inovasi yang sudah dilakukan di Desa Peliatan demi menunjang kegiatan Pembangunan di Desa Peliatan beberapa diantaranya terurai sebagai berikut :

1. INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Manteri Desa PDTT N0. 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangun Desa dan Pemerdayaan Masyarakat Desa, yang salah satunya mengatur tentang pendataan Desa, maka dalam hal ini pemutakhiran IDM sangat diperlukan.

Data IDM merupakan salah satu dasar sebagai penetapan pengalokasian Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa, alokasi afirmasi untuk Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tertinggi sebesar 1% dan alokasi kinerja untuk Desa Berkembang, Maju dan Mandiri serta indicator lainnya sebesar 4% dari total anggaran Dana Desa.

Data IDM juga digunakan sebagai acuan untuk perencanaan Pembangunan Desa dan Perdesaan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya.

2. E DESA (PEMERINTAHAN BERBASIS E GOVERNMENT)

E-Government desa adalah konsep pemerintahan elektronik yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menyediakan layanan publik dan administrasi di tingkat desa. Transformasi digital pemerintahan inilah yang menjadi fokus utama e-government desa. Aplikasi peliatan.desa.id adalah contoh nyata transformasi digital pemerintahan di tingkat desa. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat desa untuk mengakses informasi dan layanan publik secara online

3. INVENTARIS DESA

Aset Desa dan Inventaris Desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset Desa yang merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa yakni hasil asset desa yang didata, dicatat dan dilaporkan.

4. DESA KETERBUKAAN PUBLIK (PPID)

Keterbukaan informasi public merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Melalui

keterbukaan informasi public, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah secara lebih transparan dan akuntabel.

5. DESA ANTI KORUPSI

Dukungan pemerintah supra desa terhadap inovasi desa anti korupsi dalam memperkuat efektivitas dan keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Melalui alokasi sumber daya yang memadai, pengembangan kebijakan yang inklusif, dan pelatihan yang terarah, pemerintah supra desa dapat membantu memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam menerapkan praktik anti korupsi. Ini termasuk pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan publik, pendidikan dan kesadaran akan risiko korupsi, serta penguatan lembaga pengawas dan mekanisme pelaporan yang independen.

6. DESA CANTIK (DESA CINTA STATISTIK)

Berdasarkan penilaian dari badan statistik Nasional Desa Peliatan merupakan Desa Cantik atau sebutan lainnya dari Desa Cinta Statistik yang diberikan kepada seratus desa di Indonesia dan salah satunya adalah Desa Peliatan

7. PEMBENTUKAN SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 UBUD DI PELIATAN

Situasi Desa Peliatan yang jauh dari Zona penerimaan siswa baru dari sekolah SMP N yang ada di sekitar Desa Peliatan membuat anak-anak didik yang tamat SD di Desa Peliatan merasa kesulitan untuk masuk Zona penerimaan siswa di SMP, berdasarkan berbagai kajian dan melihat pentingnya Pendidikan bagi generasi emas di Desa Peliatan maka para stakeholder Adat dan Dinas bersepakat untuk membentuk SMP N di Peliatan. Berbagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Gianyar di sepakati mengeksekusi tanah dan bangunan SMP PGRI 3 UBUD di Peliatan untuk dipakai sebagai Lahan dan Bangunan, sehingga pembentukan SMP N 4 Ubud di Peliatan dapat terealisasi. Sudah tentu hal ini akan mengurangi beban para orang tua siswa dan seluruh Masyarakat dalam menyiapkan Pendidikan yang berkualitas bagi generasi emas di Desa Peliatan.

8. PARITRANA AWARD (BENTUK KEPEDULIAN KEPADA PARA TENAGA RENTAN DI DESA)

Pekerja di sektor non formal tak kalah banyaknya dengan sektor pekerja formal, sejauh ini yang baru mendapatkan perlindungan maksima dari BPJS Ketenagakerjaan baru hanya di sektor pekerja formal, oleh karena itu Pemerintah Desa Peliatan juga terus meningkatkan Upaya serapan kepesertaan dari sektor non formal mengingat pekerja di sektor non formal ini juga berhak atas jaminan sosial tersebut. Para pekerja non formal ini juga memiliki resiko yang tinggi dalam pekerjaannya, di sisi lain pekerja non formal mendapatkan upah yang rendah sehingga tak jarang mereka merasa kesulitan jika harus membayar sendiri iuran asuransinya,

Berbekal dengan kenyataan itu, Desa Peliatan hadir dalam seleksi Paritrana Award yang pertama kalinya melibatkan penilaian terhadap Desa yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenaga kerjaan.

Keberhasilan Desa Peliatan membentuk DUTA TAPA (DUTA TARUNA PEDULI PEKERJA) sebagai DUTA yang mampu menyosialisasikan dan menggerakkan Masyarakat untuk mengikuti program program BPJS ketenaga kerjaan. Desa Peliatan berhasil menganggarkan pembayaran Premi BPJS di 6 bulan pertama untuk 100 orang di th 2024 dan akan dilanjutkan untuk sebanyak 200 orang di tahun berikutnya dengan menggunakan dana APBDes, yang selanjutnya pembayaran akan dilakukan oleh para peserta secara mandiri.

9. BANKAMDES MENJAGA KEAMANAN DESA

Lembaga Bantuan Keamanan Desa atau disingkat Bankamdes merupakan organisasi atau Lembaga desa sebagai perpanjangan tangan dari apparat keamanan dalam membangun kemitraan dalam masalah kamtibmas dan masalah social lainnya yang terjadi di Desa Pealitan.

Untuk meningkatkan keamanan di Desa Peliatan inovasi pengamanan Bankamdes Desa Peliatan dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara rutin melaksanakan patrol untuk menjaga stabilitas keamanan desa.

Secara administrasi mereka juga mengisi buku jaga dengan memberikan keterangan segala sesuatu yang terjadi selama melaksanakan tugas. Buku jaga ini sangat efektif membantu pemerintahan desa untuk dapat menangani segala permasalahan yang ada, sehingga penganannya bisa segera ditangani atau diselesaikan.

10. PELESTARIAN BUDAYA

Meanyud anyudan adalah salah satu tradisi budaya warisan nenek moyang sebagai simbol pembersihan untuk mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan “Grahasta asrama” meanyud anyudan adalah kasarah budaya local Desa Peliatan yang sempat hilang oleh perkembangan jaman dan globalisasi ataupun modernisasi sejak puluhan silam.

Inovasi dan pelestarian dilakukan dengan membangkitkan kembali keunikan yang ada. Meanyud anyudan adalah budaya Masyarakat Desa Peliatan dalam rangkaian upacara perkawinan adat agama hindu yang dilaksanakan di Sungai.

Sungai bagi Masyarakat Bali memiliki makna ritual, fungsional and juga social. Berangkat dari pemikiran ini gerakan kebersihan lingkungan yang bermuara dari membersihkan Sungai inovasi meanyud anyudan kembali bisa dilaksanakan.

11. PENATAAN AMBAL AMBAL MERAIH EKONOMI

Sadar akan sebagai daerah seni yang khususnya di bidang pematung berdampak akan kekumuhan dari sisa sisa kayu yang menjadi sampah. Untuk itu mengajak Masyarakat untuk bersepakat dan berkomitmen untuk menjaga dan membersihkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Kesepakatan berupa perarem dibuat untuk mengatur dan menyepakati membersihkan serta menata ambal ambal atau telajakan.

Ambal ambal atau telajakan merupakan elemen ruang terbuka yang menjadi garis batas depan pagar tradisional rumah Bali. Jalan atau rurung, drainase dan taman telajakan merupakan bagian dari ambal ambal atau telajakan. Lebar taman telajakan memang hanya kurang lebih dari satu meter, namun ini merupakan bagian penting dalam tata ruang terbuka hijauperumahan di Bali. Dengan Adaya perarem Masyarakat mulai diajak bergerak secara bergotong royong membersihkan ambal ambal atau telajakan. Di mulai dengan membersihkan kumuhnya sampah, menanami tanaman telajakan dengan tanaman hias, tanaman IKONIK atau TEMATIK, di percantik dengan pemasangan lampu hias, penempatan patung patung dan tiang bendera yang seukuran terpasang rapi,

Gerakan ini direspon dengan baik oleh Masyarakat dengan memulai membuat tempat penginapan atau homestay yang berhasil mendatangkan para wisatawan untuk bermalam di desa ini. Kemunculan home stay ini mendorong perekonomian Masyarakat bergeliat dengan cepat. Penyewaan sepeda, penyewaan sepeda motor, restaurant kecil, laundry muncul seiring terbangunya penataan ambal ambal ini. Penyerapan tenaga kerja lokal merupakan salah satu dampak piar ekonomi nyata yang ada di daerah ini.

Julukan Desa Wisata baru diberikan pada saat kunjungan Ditjen Keuangan seluruh Indonesia ke wilayah ini di tahun 2020.

12. PELIATAN NGOGO

Sebagai Gerakan utama dalam penataan lingkungan di th 2019 Desa Peliatan membentuk sebuah komunitas yang kita sebut dengan “Peliatan Ngogo” yang lebih akrab disebut PEGO. Komunitas ini murni merupakan gerakan dari perkumpulan Masyarakat Desa yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Mereka mengabdi untuk lingkungan dan berkarya demi lingkungan bersih dan penaataan asri Desa Peliatan.

Masyarakat Desa Peliatan menyambut baik ide dari pembentukan pego ini dan memulai dengan melakukan ngogo sampah di sudut sudut kumuh yang banyak sampahnya. Ngogo adalah aktivitas mengambil, memunggut atau pun mengais seseuatu terutama sampah di berbagai sudut dan ruang desa yang masih kumuh. Pembersihan Sungai mulai rutin dbersihkan dengan melibatkan kelompok kelompok kecil di wilayahnya masimg masing baik dari unsur pemuda, PKK dan Masyarakat itu sendiri.

Gerakan komunitas pego ini telah berhasil menata kembali kebersiahan Sungai, Lorong ataupun pojok pojok tertentu yang dulunya penuh sampah menjadi area yang layak untuk dipergunakan kembali. Sebagai Desa yang ditetapkan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak dari Pemerintahan Kabupaten Gianyar dengan Kebersihan Lorong dan Sungai ini dapat dipergunakan sebagai tempat bermain dan bercanda oleh para anak di Desa Peliatan. Ada 6 titik di sepanjang Sungai ini yang telah diselesaikan. Ada yang dipergunakan sebagai tempat pembersihan atau melukat, sebagai tempat sumber mata air yang di sucikan, sebagai tempat meditasi dan kawasan wisatawan termasuk area Puspa Aman Desa Peliatan.

Dengan munculnya Kembali akses ke Sungai program pelestarian budaya meanyud anyudan bisa dilaksanakan kembali sesuai dengan rancangan program awal dari pembentukan komunitas Pego ini.

13. GERAKAN SEJUTA BIOPORI

Gerakan sejuta biopori diawali dengan gerakan seribu biopri yang diinisiasi oleh komunitas kelompok pecinta lingkungan di Desa Peliatan yang disebut Pego. Mengingat respose Masyarakat yang sangat besar selanjutnya gerakan seribu biopori ini di tingkatkan lagi menjadi gerakan sejuta biopori dan menjadika gerakan social yang diarahkan untuk pelestarian dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sejuta biopori ini merupakan inovasi terhadap kelestarian lingkungan serta memberi dampak ekonomi terhadap Masyarakat.

Gerakan ini juga mampu mengedukasi Masyarakat untuk memulai melakukan pemilahan sampah plastik dan organik. Sampah organik yang dimasukan ke dalam lobang biopori dapat menghasilkan pupuk yang dapat dipergunakan oleh masing masing lahan keluaraga maupun di lahan pangan desa. Selain itu pupuk organic hasil biopori ini dapat dijual untuk menambah perekonomian keluarga.

14. MENUJU DESA GREEN ENVIRONMENT DAN DESA LOW EMISSION

Meningkatkan kualitas hidup dan melestarikan lingkungan untuk menjadikan Desa sebagai salah satu daerah hijau yang jauh dari polusi adalah sebuah cerminan tekad Masyarakat Desa Peliatan dalam ikut serta mengelola lingkungan bersih nyaman dan jauh dari polusi.

Berbagai kegiatan telah dicanangkan berkaitan dengan hal tersebut, seperti Gerakan sejuta Biopori, Membersihksn lingkungan, ambal ambal, Lorong, Sungai gerakan penggunaan motor listrik merupakan implementasi dari keinginan Masyarakat di Desa Peliatan untuk menjadikan desa ini Desa GREEN ENVIRONMENT dan DESA LOW EMISSION.

Pembentukan Komunitas Pego (Peliatan Ngogo) sangatlah penting mengingat Desa ini adalah Desa Pariwisata dengan sebutan Desa Seni dan Budaya, memerlukan kebersihan dan keasrian dalam emndukung program program tersebut.

15. ECO ENZIM

Ketahanan Pangan sebagai jaminan ketersediaan pangan rumah tangga melalui tanaman produktif baik hortikultura, buah, bunga, peternakan dan juga perikanan. Program ketahanan pangan dalam implementasinya menggerakan masyarakat dengan memanfaatkan halaman di sekitar atau pekarangan rumah tempat tinggal adalah bagian dari tujuan program Aku Hatinya PKK. Dalam proses penanaman tanaman produktif, gerakan masyarakat ini memanfaatkan Eco-Enzyme sebagai penyubur organic penambah nutrisi tanaman.

Eco-Enzyme adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi sisa sayuran dan buah-buahan dengan campuran gula merah atau molase. Proses pembuatan Eco-Enzyme mirip dengan proses pembuatan kompos, namun penambahan

air sebagai media pertumbuhan sehingga produk akhir yang diperoleh berupa cairan yang lebih mudah digunakan dan lebih banyak manfaatnya.

16. GERAKAN MOTOR LISTRIK

Motor Listrik merupakan Solusi masa depan transportasi yang ramah lingkungan dan efisien energi. Yang sudah tentu tidak menghasilkan gas buang, motor listrik sangat membantu mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan, menjaga udara bersih dan melindungi kesehatan manusia. Disamping itu dari sisi ekonomi motor Listrik sangatlah efisien dan secara ekonomis dapat membantu kesejahteraan Masyarakat.

Desa Peliatan telah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam ikut membantu program pemerintah untuk meningkatkan akselerasi Masyarakat dalam penggunaan motor listrik.

Bekerja sama dengan WRI Indonesia, PPLH dan berbagai institusi lainnya secara aktif ikut dalam analisis Rencana Aksi Daerah Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (RAD KBLBB) 2022-2026. Untuk itu berbagai Keputusan Perbekel dikeluarkan untuk menunjukkan komitmen Desa Peliatan dalam mendukung program perbaikan mobilitas di Provinsi Bali.

Meyediakan sumber tenaga kerja yang telah dilatih untuk menjadi bengkel Konversi Motor Listrik berbasis Baterai. (sesuai Surat Pernyataan WRI Indonesia nomor:228/III/WRI-CT/2024)

17. DESA SIAGA BENCANA

Inovasi kendaraan siaga bencana Desa Peliatan merupakan hal yang baru Dimana selama ini pemerintahan Desa belum memiliki kendaraan operasional. Inovasi ini muncul setelah Desa Peliatan melakukan pengadakan Kendaraan Operasional Pemerintahan Desa di bulan April 2019. Setelah adanya mobil operasional ini pemerintahan Desa Peliatan membentuk inovasi “Kendaraan Siaga Bencana “ dengan di perkuat oleh Surat Keputusan Perbekel sehingga apabila terjadi bencana baik bencana alam maupun non alam dapat dapat mempergunakan kendaraan tersebut yang dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah di Desa Peliatan.

18. POSKESDES DESA

Kepedulian akan Kesehatan di Desa Peliatan sangatlah tinggi, untuk meningkatkan derajat Kesehatan di Desa Peliatan telah terbentuk sebuah poskesdes yang memiliki fungsi sebagai pusat penanganan kesehatan Masyarakat di Desa Peliatan.

Poskesdes ini adalah milik Masyarakat Desa Peliatan dalam pelaksanaan kesehariannya selain dibantu oleh 2 kader kesehatan yang mendapatkan insentif dari APBDes juga ada bidan yang ditugaskan dari pemerintah dan visit dokter di hari hari tertentu. Sinergitas poskesdes dan Puskesmas Ubud I sangatlah menyatu, semua kegiatan berkaitan dengan kesehatan seperti pelaksanaan Gardumas (Gerakan Terpadu Masyarakat) yang di bawah koordinator Puskesmas Ubud I selalu bersinergi dalam setiap tahapan pelaksananya.

Semua kegiatan Posyandu, Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia dan Posyandu Jiwa dipusatkan di Poskedes. Tingkat kunjungan atau utility masyarakat sangat tinggi, baik hanya untuk konsultasi kesehatan maupun melaksanaan pemeriksann kesehatan.

19. POSYANDU JIWA

Pelaksanaan Posyandu Graha Purna Jiwa Aman di Desa Peliatan dimulai di tahun 2022 yang pusat pelaksanaanya dilakukan di Poskesdes Desa Pelitan. Di awali dengan pembentukan kader Posyandu Jiwa sebanyak 10 kader untuk dilatih dan bisa membantu para tenaga medis yang sudah di ajak bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan di setiap bulanya.

Posyandu jiwa adalah salah satu pelayanan kesehatan yang terdekat bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa. Kegiatan di posyandu jiwa tidak hanya difokuskan terhadap proses pengembangan diri, ketrampilan dan peningkatan kemampuannya tapi lebih ditekankan juga kepada dukungan keluarga dalam memandirikan orang yang telah mengalami gangguan jiwa serta melakukan edukasi, promosi dan deteksi dini kepada Masyarakat sehingga yang sehat akan tetap sehat dan yang beresiko mengalami gangguan bisa terhindar dari gangguan jiwa.

Harapan akan tidak adanya lagi Masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dalam keadaan terpasung atau terkurung tidak lagi ditemukan di Desa Peliatan.

20. PUSPA AMAN SEBAGAI INOVASI GERAKAN PKK

Inovasi PUSPA AMAN merupakan hal yang baru di Desa Peliatan. Dikaitkan dengan gerakan kebersihan Sungai yang dimotori oleh gerakan Pego Desa Peliatan, mendapatkan sebuah titik di pinggir sungai yang selanjutnya dipakai sebagai tempat pembibitan berbagai tanaman tanaman yang di konsumsi seperti cabai, terong, tomat, kangkong dan lainya, juga sebagai tempat pembibitan bibit komoditi yang hasil pananya bisa dijual ke pihak ke tiga.

PKK Desa Peliatan telah mengadakan perjanjian MOU dengan seorang pengusaha peng ekspor teh herbal yang bahan bakunya bisa di suplai oleh Ibu Ibu PKK Peliatan.

Gerakan penanaman bibit konsumsi dilakukan di seluruh Desa Peliatan yang disebut dengan tanaman ikon di masing masing banjar. Hasil dari tanaman ikon in dijual dan dibeli oleh pihak ke tiga sebagai bahan baku dalam pembuatan teh herbal tersebut. Tananama yang disebut sebagai ikon tersebut yang sekarang lebih familiar dengan nama atau sebutan “TEMATIK” seperti, di Banjar Teges kanginan tanaman Kumis Kucing, Di Banjar Teges Kawan dan Yangloni Tanaman Sereh, di Banjar Kalah tanaman Jahe Merah, di Bnajar Tengah Kangin dan Tengah Kauh tanaman Tulsi, Di Banjar Taruna Tanaman Pegagan, Di Banjar Pande Tanaman Lidah Buaya, Di Banjar Ambengan tanaman Mint, Di Banjar Tebesaya tanaman Samiloto.

21. POJOK MEWARNAI OLEH PASIEN POSYANDU JIWA DALAM PELAYANAN POSYANDU BALITA

Sinergitas diantara kader posyandu di Desa Peliatan sangatlah tinggi ini terbukti dalam kegiatan posyandu balita dilaksanakan setiap bulan sekali rata rata pelaksanaan posyandu dilaksanakan di balai banjar yang ada di Desa Peliatan, dalam setiap kegiatan posyandu balita melibatkan pasien posyandu jiwa yang sudah sehat dan membantu anak-anak dalam bidang melukis. Hal ini tentu sangat berguna untuk peningkatan kepercayaan diri bagi pasien posyandu jiwa dan sudah tentu sangat berguna bagi anak-anak posyandu balita dalam setiap mengikuti kegiatan pemeriksaan karena bisa berinteraksi mewarnai selama proses kegiatan pemeriksaan kesehatan mereka.

22. POJOK DONGENG OLEH POSYANDU LANSIA DALAM PELAYANAN POSYANDU BALITA

Sinergitas juga terlihat dalam pelayanan posyandu balita yang menghadirkan pojok dongeng. Pojok dongeng dihadirkan oleh posyandu lansia dan memberikan berbagai cerita dongeng yang membuat anak-anak merasa senang dan nyaman dalam kegiatan ini. Salah seorang peserta.

4. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Peliatan telah dilaksanakan secara rutin tiap tahun yaitu melalui musyawarah rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan melibatkan semua unsur yang ada di Desa Peliatan seperti tokoh-tokoh Masyarakat, tokoh adat Kelian, BPD, LKMD dan PKK dan utusan dari masing-masing banjar dengan membawa usulan-usulan masing-masing. Semua usulan tersebut sudah barang tentu musyawarahkan terlebih dahulu dengan memberi skala prioritas pada usulan tersebut atau direngking mana yang merupakan kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang harus didahulukan. Semua usulan itu kemudian akan direkap dan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang tingkat kecamatan. Hasil Musrenbangdes itu pula di Desa Peliatan dipakai Pedoman untuk melaksanakan Program-Program di Desa

5. SARANA DAN PRASARANA.

Di dalam menjalankan Pemerintahan Desa agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program-program yang ditetapkan bersama dengan aparat Desa sudah barang tentu harus didukung oleh Sarana dan prasarana yang memadai secara maksimal. Secara umum di Desa Peliatan Sudah memiliki Sarana dan prasarana untuk Olahraga, Pendidikan dari SD sampai SMA, sarana Kesehatan, Kantor Desa, Ruang Pertemuan, Pasar Desa, yang ada di Desa Peliatan namun masih perlu mendapatkan perhatian atau masih perlu adanya perbaikan-perbaikan agar dapat dipergunakan secara maksimal.

6. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.

Di dalam menjalankan atau melaksanakan tugas tugas Pemerintahan Desa maupun kegiatan - kegiatan tersebut diatas sudah barang tentu masih banyak menemui hambatan hambatan atau permasalahan permasalahan yang kami hadapi di Desa, baik masalah Sosial, keamanan , Ekonomi, Penduduk Pendatang, yang begitu banyak mencari pekerjaan dan langsung tinggal di desa Peliatan , dan lain - lain. Namun kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi, memecahkan atau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan Musyawarah yang sudah barang tentu dengan melibatkan semua kompenen di Desa baik secara Kedinasan maupun Adat secara terpadu. Mengenai Masalah Penduduk Pendatang di desa Peliatan telah ditangani oleh Pecalang di masing - masing banjar yang koordinir oleh Kelian Banjar masing - masing, dan akan mengadakan sidak tentang penduduk pendatang Kelian banjar selalu berkoordinasi dengan pihak desa pada pelaksanaan sidak tersebut akan ikut bergabung seperti Bimas Polri, Bankamdes, Kepala Desa dan Tokoh lainnya, serta berkoordinasi dengan Tripica Kecamatan Ubud.

B A B V

PEMBANGUNAN YANG TELAH TERREALISASI

Mengacu dari Permendes No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, pembangunan di desa Peliatan selalu mengacu kepada Indeks Kesehatan (IKS), Indeks Lingkungan (IKL) dan Indeks Ekonomi (IKE) sehingga pola pembangunan yang dilaksanakan dapat tersusun dan terprogram dengan baik untuk mencapai hasil yang kita harapkan . Pembangunan yang dilaksanakan ini merupakan implementasi dari APBDes 2020 yang telah ditetapkan yang merupakan turunan dari RPJMDes yang telah tersusun di Desa Peliatan.

Penduduk sebagai salah satu sumberdaya merupakan modal dasar dalam pembangunan bila dapat dikelola secara optimal. Namun jumlah penduduk yang besar yang melebihi daya dukung lingkungan dan tidak disertai dengan peningkatan kualitas akan dapat mengganggu fungsi lingkungan atau ekosistem.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2024 dan jumlah penduduk di Desa Peliatan menunjukkan angka 8.404 jiwa. Secara umum, berdasarkan perbandingan jumlah keseluruhan penduduk dengan luas wilayah (4.93 km^2) sebagai daya dukung, adalah $1639.76 \text{ jiwa km}^{-2}$ (2018). Populasi penduduk Desa Peliatan memiliki kepadatan yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan secara serius agar tidak terjadi kerawanan di tingkat Desa Peliatan. Kepadatan penduduk di Desa Peliatan telah melebihi tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Bali yang mencapai 617 jiwa km^{-2} (SLHD Bali, 2008) atau kurang lebih 2.5 kali kepadatan penduduk provinsi Bali, dan bahkan sangat padat (hampir tujuh kali lipat) bila kita menggunakan standar FAO sebanyak 240 orang per km^2 .

5.1. Pembangunan Bidang Pendidikan:

Pada sub-sektor pendidikan terlihat bahwa Semua anak-anak usia sekolah telah mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkat umurnya. Pada tahun 2019 tidak ditemukan adanya anak usia sekolah yang buta aksara

Sumberdaya manusia di Desa Peliatan bila dilihat dari sudut pandang tingkat pendidikan ternyata sangat potensial sebagai modal dasar pembangunan desa.

Selain wajib belajar 9 tahun telah dilaksanakan dengan baik, masyarakat Peliatan telah banyak yang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga ke tingkat pascasarjana.

Banyak hal yang sudah dilakukan dibidang Pendidikan seperti :

1. Pelaksanaan Bulan Bahasa
2. Menyelenggaakan les gratis bekerja sama dengan Kampus BEC
3. Pendidikan PAUD
 - a. Menyediakan alat permainan dan edukatif
 - b. Menyediakan meja kursi
4. Pembentukan SMP N 4 Ubud di Peliatan
5. Mengadakan MOU dengan pihak ketiga berkaitan dengan pendidikan

5.2. Pembangunan Bidang Phisik Sarana dan Prasarana

Interaksi antar sumberdaya di atas (sumberdaya alam, buatan, manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana) bersifat kausalitas. Sumberdaya alam diolah, dimanfaatkan, dan diatur penggunaannya oleh manusia, melalui kreativitasnya menghasilkan sumberdaya buatan yang memiliki nilai lebih. Sumberdaya buatan tersebut sesungguhnya menjadi landasan dan cikal bakal tipologi sebuah komunitas di tingkat desa. Output sinergitas kausalitas sumberdaya alam, buatan, dan manusia terekspresi secara nyata dalam berbagai jenis prasarana dan sarana atau infrastruktur fisik dan non fisik. Infrastruktur fisik dan non fisik tersebut merupakan sumberdaya yang dimanfaatkan manusia yang selalu diupayakan pemanfaatannya secara lestari dalam kerangka pembangunan desa yang berkelanjutan. Progresivitas interelasi kausalitas antar sumberdaya melalui pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan memberikan akselerasi aksiologis yang optimal sehingga mampu menginternalisasikan eksternalitas membentuk tipologi desa yang menjadi talenta sebuah desa yakni Desa Peliatan sebagai **Desa Seni dan Budaya**.

1. Los dan Toko tambahan di Pasar umum Peliatan
2. Renovasi Kantor Desa
3. Penataan Telajakan depan kantor desa
4. Penataan Telajakan dengan Pembuatan Patung dan Taman

5. Penataan sungai berbazis budaya
6. Pembuatan rolling door
7. Pembangunan balai pertemuan
8. Pembangunan balai PAUD
9. Pembangunan Balai sisikamling
10. dll

5.3 Pembangunan di Bidang Lingkungan

Kesadaran akan kebersihan lingkungan telah menjadi Gerakan yang sangat fenomenal menuju Peliatan Bersih. Dengan dibentuknya kelompok masyarakat yang kita kenal dengan sebutan PEGO yang merupakan singkatan dari “Peliatan Ngogo atau Peliatan Go Green telah banyak mengilhami masyarakat untuk berbuat dan menata lingkungan menuju Desa Peliatan yang Indah Bersih dan Rapi “Menuju Desa Peliatan yang green environtment dan low emission”.

1. Gerakan sejuta Biopori
2. Gerakan kebersihan Bersama Pego
3. Penyebaran benih ikan
4. Penanaman pohon penghijauan
5. Penataan ambal ambal
6. Penataan gang atau lorong di sekitar Desa Peliatan
7. Gerakan eco enzyme
8. Gerakan motor listrik
9. Gerakan Puspa aman

5.4 Pembangunan di Bidang Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan adalah

1. Pelaksanaan Posyandu dengan berbagai kegiatan spt:
 - a. Pemeriksaan tambahan untuk Ibu hamil
 - b. Penanggulangan pandemic covid 19
 - c. Masker, Hand sanitizer
 - d. Bak cuci tangan
 - e. Alat permainan edukatif

- f. Dan honor kader posyandu
- 2. Jumantik
- 3. Pemeriksaan lansia
- 4. Pembentukan posyandu Jiwa
- 5. Pembentukan posyandu Lansia
- 6. Pembentukan posyandu remaja
- 7. Operasional POSKESDES seperti :
 - a. Pembelian obat
 - b. Pembelian alat kesehatan
 - c. Honor petugas Poskesdes

5.5 Pembangunan Bidang Seni dan Budaya

- 1. Menjadi duta seni mewakili Kecamatan Ubud dalam hari jadi kota Gianyar
- 2. Pembentukan organisasi Natya Sani di bidang seni
- 3. Penggalian Janger Klasik
- 4. Penggalian Arja Klasik
- 5. Pelaksanaan Parade Ogoh – ogoh
- 6. Penggalian pementasan tari Barong Landung
- 7. Operasional subak
- 8. Pecaruan batas desa
- 9. Ritual kantor
- 10. Penyerahan barang ritual
- 11. Pasraman
- 12. Piordan di bale agung
- 13. Operasional desa pakraman
- 14. Kembalinya kazanah budaya “Meanyud anyudan”
- 15. Pembuatan film film documenter berkaitan dengan budaya

5.6 Pembangunan Bidang Olah Raga

1. Pembentukan Sepak Bola Garuda Peliatan dan mengikuti turnamen Bupati Cup
2. Pembentukan Tenis Meja Garuda Peliatan dan mengikuti turnamen Bupati Cup
3. Pembentukan Garuda Bulu tangkis dan mengadakan turnament local
4. Berbagai sarana olah raga
5. Pembentukan satlak Garuda Tarung Derajat
6. Pembentukan Dojo Karate Desa
7. Koni Desa sebagai wadah pengembangan atlet Desa

5.7 Pembangunan Bidang Keamanan

1. Pembelian alat alat komunikasi
2. Operasional bankamdes
3. Peremajaan pakaian Bankamdes
4. Pelatihan pelatihan dibidang keamanan
5. Pelaksanaan patrol jaga di Desa Peliatan

5.8 Teknologi dan IT

1. Pembelian alat alat elektronik
2. Pembuatan e desa
3. Membentuk komunitas e desa
4. Desa Cerdas atau Desa digital
5. Desa Cantik

5.9 Pembangunan Bidang Pemberdayaan

1. Penyuluhan Agama
2. Penyuluhan Narkoba
3. Penyuluhan HIV Aid
4. Penyuluhan Karakter Kebnagsaan
5. Pembelian seragam PKK
6. Gerakan PKK berasama MOU dengan Made Tea
7. Pembelian seragam baju adat
8. Pembelian seragam baju dinas

5.10 BUMDES

Pembangunan Ekonomi berlanjutnya Gerakan Bumdes di Desa Peliatan telah mampu menghasilkan PAD untuk peningkatan APBDes kita.

BAB VII

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan pembangunan di Desa Peliatan dapat dirunut dari berbagai sumber permasalahan yang dirasakan semakin memberikan tekanan terhadap keberadaan desa terlebih pula dalam mewujudkan Desa Peliatan sebagai Desa Budaya. Dari sisi sumberdaya yang ada di Desa Peliatan, tampak bahwa sepertinya kepadatan penduduk telah melebihi daya dukung lahan. Tingginya jumlah penduduk selain merupakan potensi besar sebagai modal pembangunan, namun sebaliknya jumlah penduduk yang tinggi secara antropogenik akan memberikan dampak besar terhadap lingkungan manakala tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Besarnya migrasi masuk sebagai akibat kehadiran penduduk pendatang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan ruang baik untuk akomodasi ataupun untuk kegiatan berusaha. Selain berkaitan dengan ruang peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan meningkatnya produksi sampah dan limbah. Penyempitan lahan pertanian sebagai dampak lanjutan telah memberikan tekanan semakin besar, semakin mendesak ruang-ruang terbuka hijau sehingga memerlukan kebijakan yang arif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain permasalahan di atas implementasi pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan kesiapan dan penaatan terhadap berbagai implementasi regulasi baik berupa peraturan atau keputusan yang harus ditaati oleh semua komponen masyarakat dan pemangku kepentingan. Transparansi, akuntabilitas, dan berwawasan ke depan sudah seharusnya menjadi bagian dari prilaku semua pemangku kepentingan dan memerlukan pendekatan secara berkelanjutan. Fokus manajemen pemerintahan tampaknya harus dipersiapkan menuju reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Desa Peliatan.

Berkiprah di bidang seni dan budaya adalah salah satu karakteristik dan telah menjadikan talenta warga Peliatan sebagai warga Desa Seni Budaya. Komitmen tersebut telah berkali-kali mendapatkan tantangan besar baik karena covid 19 yang sedang merebak ataupun masalah lain yang yang mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan di Bali, penyakit zoonosis, dan kehadiran pebisnis yang semakin menyudutkan posisi para seniman lokal. Kelesuan produk seni di

pasaran tidak menyurutkan kiprah para seniman Peliatan untuk berkarya menghasilkan karya seni yang makin hari makin berkualitas.

Pertanian dan peternakan meskipun tidak berada dalam kawasan yang luas seperti pada kecamatan lainnya, sumberdaya pertanian dan peternakan tetap menjadi tumpuan harapan masyarakat Peliatan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun format model pertanian terintegrasi (Program Simantri) yang sangat adaptif untuk dikembangkan di Desa Peliatan.

PEMECAHAN MASALAH

Mencermati permasalahan di atas maka beberapa solusi yang telah dan akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk yang tinggi didekati dengan program pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk peningkatan kapasitas dalam bidang industri rumah tangga dan kerajinan
2. Meningkatnya alih fungsi lahan memerlukan solusi dan kesepakatan antar pengguna lahan dengan masyarakat di wilayah sekitar terkena dampak alih fungsi.
3. Sosialisasi dan penyadaran terhadap tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik selalu diupayakan untuk meningkatkan kinerja pembangunan desa secara keseluruhan
4. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan selalu dijadikan *mainstremme* (diarusutamakan) dalam setiap program dan kegiatan menuju Bali *Clean and Green Province*.
5. Dukungan terhadap pembangunan pertanian dalam rangka pelestarian fungsi ekosistem yang diwujudkan dalam bentuk program Simantri perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pendidikan telah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan baik dari jumlah wajib belajar 9 tahun dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan.
2. Kesehatan masyarakat semakin baik yang dapat dilihat dari sisi penanganan, kepemilikan sarana kesehatan serta semakin mantapnya pelayanan poliklinik Desa Peliatan
3. Desa Peliatan tetap menjadi desa yang aman dan tertib terlihat dari tidak adanya konflik dan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban desa.
4. Partisipasi masyarakat Desa Peliatan semakin solid tidak saja dalam konstelasi pemilihan figur pemimpin tetapi juga partisipasi dalam wujud gotong royong untuk meningkatkan pembangunan desa.
5. Dari sudut pandang pemerintahan desa, tidak saja bangunan fisik kantor yang cukup representatif tetapi segala sarana dan prasarana perkantoran serta administrasinya telah terpelihara dan tertata dengan baik. Dilain pihak pemerintahan Desa Peliatan dikelola oleh personal yang memiliki integritas diri tinggi, ditunjang oleh perangkat keras yang sangat memadai, serta manajemen pemerintahan selalu mengikuti mekanisme organisasi kepemerintahan yang baik.
6. Lembaga Kemasyarakatan sebagai indikator tingkat perkembangan desa menunjukkan bahwa semua institusi penunjang pembangunan di Desa Peliatan sangat aktif untuk membangun desa melalui kelompok profesinya masing-masing cukup tinggi, terlihat dari beragamnya forum dan kelembagaan lainnya sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa

7. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang menjadi domain utama para Tim Penggerak PKK Desa Peliatan telah membuktikan aktivitasnya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan desa dan menjaga ketahanan pangan di Desa Peliatan.

Berdasarkan uraian permasalahan dan pemecahannya nampaknya ke depan Desa Peliatan memerlukan strategi pendekatan yang lebih holistik untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan seirama dengan program pemerintah pada level hierarkhi yang lebih tinggi. Semoga.

BAB VIII **PENUTUP**

Dari Uraian diatas dalam Profil Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa :

1. Profil Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 23 ayat 2 merupakan suatu kewajiban bagi perbekel untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan pemerintahan desa kepada Masyarakat.
2. Profil Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa diberbagai bidang termasuk pelaksanaan tugas - tugas perbekel dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Secara Umum Perekonomian masyarakat Desa Peliatan pada tahun 2024 dalam kondisi yang semakin membaik, hal ini berkat didukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti Pasar desa, adanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang sudah mapan dan masih banyak lagi koperasi – koperasi banjar yang berkembang dengan pesatnya dan peran BUMDes Praja Krtha Laksmi
4. Secara Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan sudah diupayakan secara maksimal sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku dan sesuai dengan pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih adanya kekurangan – kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami dalam menjalankan pemerintahan di Desa, yang sudah barang tentu akibat dari keterbatasan kemampuan kami.

Untuk meningkatkan kulitas dan memperbaiki pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada tahun anggaran mendatang kami mohon agar bapak Bupati melalui jajarannya yang terkait selalu memberikan kami bimb bingan, tuntunan dan pengarahan serta petunjuk – petunjuk lebih lanjut agar didalam kami melaksanakan tugas sesu dengan koridor dan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah Profil Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan Akhir Tahun 2024 sebagai amanat dan Perintah dari Undang – Undang. Dan apabila ada kesalahan dan kejanggalan-kejanggalan kami mengharapkan Usul saran maupun Kritik sebagai masukan (input) yang Sifatnya membangun demi kelancaran dan kesempurnaan dalam penyusunan rencana / program maupun pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang .

Peliatan, 31 Desember 2024

Perbekel Desa Peliatan



Made Dwi Sutaryantha

LAPMPIRAN – LAMPIRAN

**DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA DAN KELURAHAN**

Desa: PELIATAN
Kecamatan: UBUD
Kabupaten: KAB. GIANYAR
Provinsi: BALI
Bulan: 7
Tahun: 2024

Nama Pengisi: I Nyoman Bing Sunawar

Pekerjaan: Staf Desa

Jabatan: Staf Pemerintahan

Kepala Desa / Lurah: I Made Dwi Sutaryantha

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN

UNTUK MENGISI PROFIL

DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : Kartu Keluarga

Referensi 2: APBDesa

Referensi 3: Buku Kependudukan

Referensi 4: Posyandu

I. Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Umum

1. a. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah utara	: Desa Petulu	:
Sebelah selatan	: Desa Mas	:
Sebelah timur	: Desa Pejeng	:
Sebelah barat	: Desa Ubud	:

1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
9999	Perdes No Perda No	Ada

2. Luas wilayah menurut penggunaan

Luas tanah sawah	246,00 Ha
Luas tanah kering	0,00 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
Luas fasilitas umum	0,04 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
Total luas	246,04 Ha

TANAH SAWAH

Sawah irigasi teknis	246,00 Ha
Sawah irigasi ½ teknis	0,00 Ha
Sawah tada hujan	0,00 Ha
Sawah pasang surut	0,00 Ha
Total luas	246,00 Ha

TANAH KERING

Tegal/ladang	0,00 Ha
Pemukiman	0,00 Ha
Pekarangan	0,00 Ha
Total luas	0,00 Ha

TANAH BASAH

Tanah rawa	0,00 Ha
Pasang surut	0,00 Ha
Lahan gambut	0,00 Ha
Situ/waduk/danau	0,00 Ha
Total luas	0,00 Ha

TANAH PERKEBUNAN	
Tanah perkebunan rakyat	0,00 Ha
Tanah perkebunan negara	0,00 Ha
Tanah perkebunan swasta	0,00 Ha
Tanah perkebunan perorangan	0,00 Ha
Total luas	0,00 Ha
TANAH FASILITAS UMUM	
Kas Desa/Kelurahan:	0,00 Ha
a. Tanah bengkok	0,00 Ha
b. Tanah titi sara	0,00 Ha
c. Kebun desa	0,00 Ha
d. Sawah desa	0,00 Ha
Lapangan olahraga	0,04 Ha
Perkantoran pemerintah	0,00 Ha
Ruang publik/taman kota	0,00 Ha
Tempat pemakaman desa/umum	0,00 Ha
Tempat pembuangan sampah	0,00 Ha
Bangunan sekolah/perguruan tinggi	0,00 Ha
Pertokoan	0,00 Ha
Fasilitas pasar	0,00 Ha
Terminal	0,00 Ha
Jalan	0,00 Ha
Daerah tangkapan air	0,00 Ha
Usaha perikanan	0,00 Ha
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	0,00 Ha
Total luas	0,04 Ha
TANAH HUTAN	
Hutan lindung	0,00 Ha
Hutan produksi	0,00 Ha
a. Hutan produksi tetap	0,00 Ha
b. Hutan terbatas	0,00 Ha
Hutan konservasi	0,00 Ha
Hutan adat	0,00 Ha
Hutan asli	0,00 Ha
Hutan sekunder	0,00 Ha
Hutan buatan	0,00 Ha
Hutan mangrove	0,00 Ha
Hutan suaka	0,00 Ha
a. Suaka alam	0,00 Ha
b. Suaka margasatwa	0,00 Ha
Hutan rakyat	0,00 Ha
Total luas	0,00 Ha

3. Iklim

Curah hujan	1.899,00 mm
Jumlah bulan hujan	6,00 bulan
Kelembapan	27,30
Suhu rata-rata harian	32,00 oC
Tinggi tempat dari permukaan laut	600,00 mdl

4. Jenis dan Kesuburan Tanah

Warna tanah (sebagian besar)	Hitam
Tekstur tanah	Lempungan
Tingkat kemiringan tanah	8,00 derajat
Lahan kritis	0,00 Ha
Lahan terlantar	5,00 Ha

Tingkat erosi tanah		
Luas tanah erosi ringan		0,00 Ha
Luas tanah erosi sedang		0,00 Ha
Luas tanah erosi berat		0,00 Ha
Luas tanah yang tidak ada erosi		0,00 Ha
5. Topografi		
Desa/kelurahan dataran rendah	Ya	493,00 Ha
Desa/kelurahan berbukit-bukit	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan lereng gunung	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan kawasan rawa	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan kawasan gambut	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan aliran sungai	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan bantaran sungai	Tidak	0,00 Ha
Lain-Lain		0,00 Ha
Letak		
Desa/kelurahan kawasan perkantoran	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan kawasan campuran	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan kawasan industri	Tidak	0,00 Ha
Desa/Kelurahan kepulauan	Tidak	0,00 Ha
Desa/Kelurahan pantai/pesisir	Tidak	0,00 Ha
Desa/Kelurahan kawasan hutan	Tidak	0,00 Ha
Desa/Kelurahan taman suaka	Tidak	0,00 Ha
Desa/Kelurahan kawasan wisata	Tidak	0,00 Ha
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain	Tidak	0,00 Ha
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain	Tidak	0,00 Ha
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak	0,00 Ha
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan rawan banjir	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan bebas banjir	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan potensial tsunami	Tidak	0,00 Ha
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi	Tidak	0,00 Ha
Orbitasi		
Jarak ke ibu kota kecamatan	2,00 Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	0,00 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	8,00 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	0,00 unit	Tidak Ada
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	8,00 Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	0,00 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	0,00 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	0,00 unit	Tidak Ada
Jarak ke ibu kota provinsi	25,00 Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	0,00 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	0,00 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	0,00 unit	Tidak Ada
B. PERTANIAN		
B.1. TANAMAN PANGAN		
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan		
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	0 keluarga	
Tidak memiliki	0 keluarga	
Memiliki kurang 10 ha	0 keluarga	
Memiliki 10 – 50 ha	0 keluarga	
Memiliki 50 – 100 ha	0 keluarga	
Memiliki lebih dari 100 ha	0 keluarga	
Jumlah total keluarga petani	0 keluarga	

2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini**3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan****A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan**

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	keluarga
Tidak memiliki	keluarga
Memiliki kurang dari 10 ha	keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	keluarga
Memiliki 100 – 500 ha	keluarga
Memiliki 500 – 1000 ha	keluarga
Memiliki lebih dari 1000 ha	keluarga
Jumlah total keluarga perkebunan	keluarga

B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan

Jenis Tanaman	Luas (ha)	Hasil panen (Ton/ha)
4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan ...		
Dijual langsung ke konsumen		Tidak
Dijual ke pasar		Tidak
Dijual melalui KUD		Tidak
Dijual melalui tengkulak		Tidak
Dijual melalui pengecer		Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel		Tidak
Tidak dijual		Tidak

B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA**C. PERKEBUNAN****1. Pemilikan Lahan Perkebunan**

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	keluarga
Tidak memiliki	keluarga
Memiliki kurang dari 5 ha	keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	keluarga
Memiliki 100 – 500 ha	keluarga
Memiliki 500 – 1000 ha	keluarga
Memiliki lebih dari 1000 ha	keluarga
Jumlah total keluarga perkebunan	keluarga
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara	keluarga
Total Luas Perkebunan	Ha

2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas

Jenis	Swasta/negara		Rakyat	
	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)

3. Pemasaran Hasil Perkebunan ...

Dijual langsung ke konsumen	Tidak
Dijual ke pasar hewan	Tidak
Dijual melalui KUD	Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Tidak
Dijual melalui Pengecer	Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Tidak
Tidak dijual	Tidak

D. KEHUTANAN**1. Luas Lahan Menurut Pemilikan**

Milik Negara	0,00 ha
Milik Adat/Ulayat	0,00 ha
Perhutani/Instansi Sektoral	0,00 ha
Milik masyarakat perorangan	0,00 ha
Total	0,00 ha

2. Hasil Hutan**3. Kondisi Hutan**

Kondisi Hutan	Baik	Rusak	Total

4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan

5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan ...

Dijual langsung ke konsumen	Tidak
Dijual ke pasar	Tidak
Dijual melalui KUD	Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Tidak
Dijual melalui Pengecer	Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Tidak
Tidak dijual	Tidak

E. PETERNAKAN**1. Jenis populasi ternak**

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi

2. Produksi Peternakan**3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak**

Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll)	0,00 ha
Produksi hijauan makanan ternak	0,00 Ton/ha
Luas lahan gembalaan	0,00 ha
Dipasok dari luar desa/kelurahan	0,00 Ton
Disubsidi dinas	0,00 Ton
Lainnya	0,00 Ton

4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak**5. Pemasaran Hasil Ternak ...**

Dijual langsung ke konsumen	Tidak
Dijual ke pasar	Tidak
Dijual melalui KUD	Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Tidak
Dijual melalui Pengecer	Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Tidak
Tidak dijual	Tidak

6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan

Milik masyarakat umum	0,00 ha
Milik perusahaan peternakan (ranch)	0,00 ha
Milik perorangan	0,00 ha
Sewa pakai	0,00 ha
Milik pemerintah	0,00 ha
Milik masyarakat adat	0,00 ha
Lainnya	0,00 ha

F. PERIKANAN**1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau****2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar****3. Jenis ikan dan produksi****4. Pemasaran Hasil Perikanan ...**

Dijual langsung ke konsumen	Tidak
Dijual ke pasar	Tidak
Dijual melalui KUD	Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Tidak
Dijual melalui Pengecer	Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Tidak
Tidak dijual	Tidak

G. BAHAN GALIAN**1. Jenis dan deposit bahan galian****2. Produksi bahan galian****3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian****4. Pemasaran Hasil Galian ...**

Dijual langsung ke konsumen	Tidak
Dijual ke pasar	Tidak

Dijual melalui KUD	Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Tidak
Dijual melalui Pengecer	Tidak
Dijual ke Perusahaan	Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Tidak
Tidak dijual	Tidak

H. SUMBER DAYA AIR**1. Potensi Air dan Sumber Daya Air**

Sungai	Sedang
Mata Air	Sedang

2. Sumber Air Bersih

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
PAM	791	1898	Baik

3. Kualitas Air Minum

	Berbau	Berwarna	Berasa	Baik
Mata Air	Tidak	Tidak	Ya	
Sumur gali	Tidak	Tidak	Ya	
Sumur pompa	Tidak	Tidak	Ya	
Hidran umum	Tidak	Tidak	Ya	
PAM	Tidak	Tidak	Ya	
Pipa	Tidak	Tidak	Ya	
Sungai	Tidak	Tidak	Ya	

4. Sungai

Jumlah sungai	0 buah
Kondisi	
Tercemar	Tidak
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi	Tidak
Keruh	Tidak
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air	Tidak
Berkurangnya biota sungai	Tidak
Kering	Tidak

5. Rawa

Luas rawa	0,00 ha
Pemanfaatan	
Perikanan darat maupun laut	
Air baku untuk pengolahan air minum	
Cuci dan mandi	
Irigasi	
Buang air besar	
Perikanan	
Sayuran	
Pembudidayaan hutan mangrove	
Lain-Lain	

6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ

Luas	0,00 ha
Pemanfaatan	
Perikanan	
Air Minum/Air Baku	
Cuci dan mandi	
Irigasi	
Buang air besar	
Pembangkit listrik	
Prasarana transportasi	
Lainnya	
Kondisi	
Tercemar	
Pendangkalan	
Keruh	
Berlumpur	

7. Air Panas

Sumber	Jumlah Lokasi	Pemanfaatan (wisata, Pengobatan Energi, dll)	Kepemilikan/Pengelolaan		
			Pemda	Swasta	Adat/Perorangan

I. KUALITAS UDARA

Sumber	Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran	Polutan Pencemaran	Efek terhadap Kesehatan (gangguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll)	Kepemilikan		
				Pemda	Swasta	Perorangan
Kendaraan bermotor	0			0	1	1

J. KEBISINGAN

Tingkat Kebisingan	Ekses dampak kebisingan	Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll)	Efek Terhadap Penduduk		
Kebisingan Ringan		Kendaraan			

K. RUANG PUBLIK/TAMAN

Ruang Publik/ Taman	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Taman Desa/Kel.	Ada	500,00 M ²	Aktif
Tanah Adat	Ada	100,00 M ²	Aktif
Jumlah Total		... M ²	

L. POTENSI WISATA

Lokasi/ Tempat/ Area Wisata	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Situs Sejarah, dan Museum	Ada	5,00 ha	Aktif

II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA**A. JUMLAH**

Jumlah laki-laki	4167 orang
Jumlah perempuan	4247 orang
Jumlah total	8414 orang
Jumlah kepala keluarga	1895 KK
Kepadatan Penduduk	1.706,69 per KM

B. USIA

Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	0 orang	0 orang	39 tahun	35 orang	48 orang
1 tahun	0 orang	0 orang	40	45 orang	48 orang
2	0 orang	0 orang	41	40 orang	44 orang
3	0 orang	0 orang	42	32 orang	63 orang
4	3 orang	4 orang	43	66 orang	70 orang
5	18 orang	13 orang	44	55 orang	56 orang
6	12 orang	11 orang	45	59 orang	79 orang
7	23 orang	28 orang	46	64 orang	83 orang
8	53 orang	31 orang	47	70 orang	69 orang
9	43 orang	51 orang	48	71 orang	83 orang
10	49 orang	44 orang	49	80 orang	79 orang
11	44 orang	38 orang	50	70 orang	76 orang
12	60 orang	43 orang	51	68 orang	78 orang
13	53 orang	49 orang	52	75 orang	80 orang
14	60 orang	61 orang	53	86 orang	79 orang
15	48 orang	67 orang	54	74 orang	62 orang
16	53 orang	63 orang	55	81 orang	80 orang
17	61 orang	77 orang	56	66 orang	84 orang
18	78 orang	59 orang	57	73 orang	62 orang
19	70 orang	63 orang	58	50 orang	68 orang
20	82 orang	54 orang	59	56 orang	56 orang
21	83 orang	72 orang	60	58 orang	67 orang
22	72 orang	68 orang	61	44 orang	38 orang
23	71 orang	64 orang	62	63 orang	69 orang
24	78 orang	69 orang	63	57 orang	43 orang
25	66 orang	86 orang	64	31 orang	45 orang
26	66 orang	66 orang	65	54 orang	59 orang
27	75 orang	66 orang	66	24 orang	40 orang
28	74 orang	50 orang	67	38 orang	52 orang
29	54 orang	52 orang	68	39 orang	44 orang
30	70 orang	66 orang	69	26 orang	36 orang
31	61 orang	55 orang	70	66 orang	42 orang

32	75 orang	66 orang	71	41 orang	32 orang
33	76 orang	59 orang	72	27 orang	32 orang
34	46 orang	61 orang	73	33 orang	47 orang
35	62 orang	54 orang	74	19 orang	32 orang
36	40 orang	42 orang	75	25 orang	42 orang
37	42 orang	53 orang	Lebih dari 75	220 orang	254 orang
38	34 orang	42 orang	Total	4167 orang	4247 orang

C. PENDIDIKAN

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	215 orang	213 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	879 orang	830 orang
Tamat SD/sederajat	154 orang	123 orang
Jumlah Total	2.414 orang	

D. MATA PENCAHARIAN POKOK

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	481 orang	100 orang
Buruh Tani	100 orang	50 orang
Pegawai Negeri Sipil	156 orang	94 orang
Dokter swasta	7 orang	3 orang
Bidan swasta	2 orang	3 orang
Ahli Pengobatan Alternatif	3 orang	1 orang
Arsitektur/Desainer	17 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	1362 orang	341 orang
Wiraswasta	281 orang	400 orang
Buruh Harian Lepas	221 orang	120 orang
Anggota Legislatif	1 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk	3.743 orang	

E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	55 orang	12 orang
Kristen	8 orang	2 orang
Katholik	6 orang	1 orang
Hindu	5152 orang	4169 orang
Budha	1 orang	0 orang
Jumlah	5.222 orang	4.184 orang

F. KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	0 orang	0 orang

G. ETNIS

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	0 orang	0 orang

H. CACAT MENTAL DAN FISIK

Jenis Cacat	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	0 orang	0 orang

I. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	0 orang	0 orang
Total Jumlah	0 orang	

J. KUALITAS ANGKATAN KERJA

Angkatan Kerja	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	0 orang	0 orang

III. POTENSI KELEMBAGAAN

A. LEMBAGA PEMERINTAHAN	Perda
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan	Perda
Dasar hukum pembentukan BPD	Perda
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	7 orang
Jumlah perangkat desa/kelurahan	17 unit kerja
Kepala Desa/Lurah	Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada - Aktif
Kepala Urusan Pembangunan	Ada - Aktif

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada - Aktif
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada - Aktif
Kepala Urusan Umum	Ada - Aktif
Kepala Urusan Keuangan	Ada - Aktif
Kepala Urusan.....	Tidak Ada
Kepala Urusan.....	Tidak Ada
Jumlah Staf	6 orang
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	10 dusun/lingkungan
Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Kepala Desa/Lurah	SLTA
Sekretaris Desa/Kelurahan	SLTA
Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA
Kepala Urusan Pembangunan	S1
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	SLTA
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	S1
Kepala Urusan Umum	S1
Kepala Urusan Keuangan	S1
Kepala Urusan	
Kepala Urusan	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
Keberadaan BPD	Ada - Aktif
Jumlah Anggota BPD	7 orang
Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Ketua	S3
Wakil Ketua	S3
Sekretaris	S1
Anggota, Nama : Ni Made Widhi Astuti, SE.	S1
Anggota, Nama : Putu Adi Pramadipa Rimbawa, AMD	DIPLOMA
Anggota, Nama : I Wayan Widia	SLTA
Anggota, Nama : Ni Komang Budiani	S1
Anggota, Nama :	S1
Anggota, Nama :	DIPLOMA
Anggota, Nama :	S1
B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN	
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK)	
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN	
Jumlah	1
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa
Jumlah pengurus	33 orang
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan
Ruang lingkup kegiatan	8 Jenis , Yakni Desa Peliatan
PKK	
Jumlah	9
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa
Jumlah pengurus	90 orang
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan
Ruang lingkup kegiatan	45 Jenis , Yakni Desa Peliatan
RUKUN WARGA	
Jumlah	10
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa
Jumlah pengurus	50 orang
Alamat kantor	Masing - masing Banjar di Desa Peliatan
Ruang lingkup kegiatan	100 Jenis , Yakni Desa Peliatan
KARANG TARUNA	
Jumlah	1
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa
Jumlah pengurus	40 orang
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan
Ruang lingkup kegiatan	15 Jenis , Yakni Desa Peliatan
KELOMPOK TANI/NELAYAN	

Jumlah	12		
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum		
Jumlah pengurus	36 orang		
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan		
Ruang lingkup kegiatan	5 Jenis , Yakni Desa Peliatan		
LEMBAGA ADAT			
Jumlah	2		
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum		
Jumlah pengurus	29 orang		
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan		
Ruang lingkup kegiatan	3 Jenis , Yakni Desa Pakraman Peliatan		
BADAN USAHA MILIK DESA			
Jumlah	1		
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan Perdes dan Perda Kab/Kota		
Jumlah pengurus	20 orang		
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan		
Ruang lingkup kegiatan	5 Jenis , Yakni Desa Peliatan		
ORGANISASI KEAGAMAAN			
Jumlah	5		
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum		
Jumlah pengurus	25 orang		
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan		
Ruang lingkup kegiatan	10 Jenis , Yakni Desa Peliatan		
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN			
Jumlah	1		
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa		
Jumlah pengurus	5 orang		
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan		
Ruang lingkup kegiatan	5 Jenis , Yakni Desa Peliatan		
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA			
Jumlah	10		
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum		
Jumlah pengurus	80 orang		
Alamat kantor	Masing - masing Banjar di Desa Peliatan		
Ruang lingkup kegiatan	50 Jenis , Yakni Desa Peliatan		
KELOMPOK GOTONG ROYONG			
Jumlah	10		
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum		
Jumlah pengurus	10 orang		
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan		
Ruang lingkup kegiatan	3 Jenis , Yakni Desa Peliatan		
YAYASAN			
Jumlah	1		
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa		
Jumlah pengurus	5 orang		
Alamat kantor	Kantor Perbekel Desa Peliatan		
Ruang lingkup kegiatan	1 Jenis , Yakni Desa Peliatan		
C. TINGKAT PARTISIPASI POLITIK			
D. LEMBAGA EKONOMI			
1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan	Jumlah/unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	12		12
Kelompok Simpan Pinjam	2		2
Jumlah	14		18
2. Jasa Lembaga Keuangan	Jumlah/unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus
Lembaga Keuangan Non Bank	2		6
Jumlah	2		6
3. Industri Kecil dan Menengah			
Jumlah			
4. Usaha Jasa Pengangkutan	Jumlah Pemilik	Kapasitas	Tenaga Kerja
Angkutan Sungai			
Angkutan Laut			
Angkutan Udara			
Ekspedisi Dan Pengiriman			
5. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum,sayuran, barang & jasa, tambang, dll)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap

Pasar Hasil Bumi/Tradisional/ Harian	1 unit	50 jenis	1000 orang
Pasar Kaget/Pasar Khusus(mis. Psr Ternak, dll)	1 unit	15 jenis	20 orang
Swalayan	2 unit	50 jenis	1000 orang
Warung Serba Ada	255 unit	20 jenis	1000 orang
Toko Kelontong	255 unit	20 jenis	1000 orang
Usaha Peternakan	5 unit	5 jenis	10 orang
Usaha Minuman(kemasan, dll)	2 unit	2 jenis	25 orang
Pengolahan Kayu	100 unit	100 jenis	1000 orang
	20 unit	5 jenis	50 orang
6. Usaha Jasa Hiburan			
Sandiwara/Drama	5 unit	5 jenis	500 orang
Wayang Orang/Wayang Golek	5 unit	1 jenis	15 orang
7. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM Dan Air			
SPBU	4 unit	1 jenis	80 orang
Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak	5 unit	1 jenis	10 orang
Usaha air minum kemasan/isi ulang	2 unit	2 jenis	25 orang
8. Usaha Jasa Keterampilan	Jumlah	Jumlah Jenis produk yang diperdagangkan	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Tukang Kayu	200 unit	1 jenis	200 orang
Tukang Batu	50 unit	1 jenis	150 orang
Tukang Jahit/Bordir	25 unit	1 jenis	100 orang
Tukang Cukur	7 unit	1 jenis	14 orang
Tukang Service Elektronik	3 unit	3 jenis	15 orang
Tukang Besi	15 unit	1 jenis	45 orang
Tukang Gali Sumur	5 unit	1 jenis	15 orang
Tukang Pijat/Urut/Pengobatan	30 unit	1 jenis	60 orang
9. Usaha Jasa Hukum dan Konsultansi			
Notaris	5 unit	1 jenis	20 orang
Pengacara/Advokat	1 unit	1 jenis	5 orang
Pejabat Pembuat Akta Tanah	5 unit	1 jenis	20 orang
10. Usaha Jasa Penginapan			
Persewaan Kamar	300 unit	1 jenis	600 orang
Kontrakan Rumah	300 unit	1 jenis	600 orang
Hotel	5 unit	1 jenis	250 orang
Home Stay	150 unit	1 jenis	500 orang
Villa	50 unit	1 jenis	250 orang

E. LEMBAGA PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal							
Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa / Kelurahan		
Play Group	4	Terdaftar	0	0	4	16	115
TK	2	Terdaftar	0	0	2	15	250
SD	4	Terdaftar	4	0	0	57	875
SMP	1	Terdaftar	0	1	0	40	656
SMA	2	Terdaftar	0	2	0	77	637

2. Pendidikan Formal Keagamaan							
Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	DII		

3. Pendidikan Non Formal/Kursus						
Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan (pemerintah, yayasan,dll)	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa	

F. LEMBAGA ADAT

1. Keberadaan Lembaga Adat	
Pemangku Adat	1
Kepengurusan Adat	1
2. Simbol Adat	
Rumah Adat	1
Barang Pusaka	1
Naskah-naskah	1
Lainnya	1
3. Jenis Kegiatan Adat	
Musyawarah adat	1
Sanksi Adat	1

Upacara Adat Perkawinan	1
Upacara Adat Kematian	1
Upacara Adat Kelahiran	1
Upacara Adat dalam bercocok tanam	1
Upacara Adat bidang perikanan/laut	0
Upacara Adat bidang kehutanan	0
Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam	1
Upacara adat dalam Pembangunan rumah	1
Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik	1

G. LEMBAGA KEAMANAN**1. Hansip dan Linmas**

Keberadaan Hansip dan Linmas	1
Jumlah anggota Hansip	35 orang
Jumlah anggota Satgas Linmas	39 orang
Pelaksanaan SISKAMLING	1
Jumlah Pos Kamling	25 buah

2. Satpam Swakarsa

Keberadaan SATPAM SWAKARSA	1
Jumlah anggota	35 orang
Nama organisasi induk	Bankamdes
Pemilik organisasi	2
Keberadaan organisasi keamanan lainnya	1

3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI – POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS

Mitra Koramil / TNI	1
Jumlah anggota	1 Orang
Jumlah kegiatan	1 Jenis kegiatan
Lainnya	
Babinkamtibmas / POLRI	1
Jumlah anggota	1 Orang
Jumlah kegiatan	1 Jenis kegiatan
Lainnya	

IV. POTENSI PRASARANA DAN SARANA**A. PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI****1. Prasarana Transportasi Darat**

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1 Panjang jalan aspal	20,00	0,00

2. Sarana Transportasi Darat**3. Prasarana Transportasi Laut/Sungai****4. Sarana Transportasi Sungai/Laut**

4.1 Panjang jalan aspal	Ada - 3.5 unit
-------------------------	----------------

5. Prasarana Transportasi Udara**B. PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI****1. Telepon****2. Kantor Pos****3. Radio/TV****4. Koran/majalah/buletin****C. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI****1. Prasarana air bersih**

Jumlah sumur pompa	unit
Jumlah sumur gali	unit
Jumlah hidran umum	unit
Jumlah PAH	unit
Jumlah tangki air bersih	unit
Jumlah embung	unit
Jumlah mata air	unit

Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum	unit
2. Sanitasi	
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	
Sumur resapan air rumah tangga	rumah
Jumlah MCK Umum	unit
Pemilik jumlah jamban keluarga	KK
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	

D. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI

1. Prasarana Irigasi	
Panjang saluran primer	0,00 m
Panjang saluran sekunder	0,00 m
Panjang saluran tersier	0,00 m
Jumlah pintu sadap	unit
Jumlah pintu pembagi air	unit

2. Kondisi

Panjang saluran primer rusak	0,00 m
Panjang saluran sekunder rusak	0,00 m
Panjang saluran tersier rusak	0,00 m
Jumlah pintu sadap rusak	unit
Jumlah pintu pembagi air rusak	unit

E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN

1. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Gedung Kantor	
Kondisi	
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah	
Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan	
Lainnya 1	
Lainnya 2	
Inventaris dan alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
Kendaraan dinas	unit
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	
Buku administrasi kependudukan	
Buku data inventaris	
Buku data aparat	
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan	
Buku administrasi pajak dan retribusi	
Buku data tanah	
Buku laporan pengaduan masyarakat	
Buku agenda ekspedisi	
Buku profil desa/kelurahan	
Buku data induk penduduk	
Buku buku data mutasi penduduk	
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan	
Buku registrasi pelayanan penduduk	
Buku data penduduk sementara	
Buku anggaran penerimaan	
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan	
Buku kas umum	
Buku kas pembantu penerimaan	

Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan	
Buku data lembaga kemasyarakatan	

2. Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD

Gedung Kantor	
Ruangan Kerja	Ruang
Balai BPD	
Kondisi	
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
Inventaris dan alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	bah
Jumlah meja	bah
Jumlah kursi	bah
Jumlah almari arsip	bah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
Lainnya	

Administrasi BPD

Buku-buku administrasi keanggotaan BPD	
Buku administrasi kegiatan BPD	Jenis
Buku kegiatan BPD	
Buku Himpunan Peraturan Desa yang ditetapkan BPD dan Kepala Desa	
Lainnya	

3. Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain

Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	
Buku administrasi	jenis
Jenis kegiatan	Jenis
Jumlah pengurus	Orang
Lainnya	

F. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	1
Peralatan Kantor: komputer, fax	1
Mesin tik	1
Kardek	0
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	5 jenis
Jumlah meja dan kursi	0 unit
Lainnya	0

LKMD/LPM atau sebutan lain

Memiliki kantor sendiri	1
Peralatan Kantor : komputer, fax	1
Mesin tik	0
Kardek	0
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	7 jenis
Jumlah meja dan kursi	2 unit
Buku administrasi	7 jenis
Jumlah kegiatan	6 jenis
Lainnya	1

PKK

Gedung/kantor	1
Peralatan kantor/ATK/inventaris	1
Kepengurusan	
Buku administrasi PKK	1
Kegiatan	1
Jumlah kegiatan	10 jenis

Karang Taruna

Kepengurusan	1
Buku administrasi	1 Jenis

Jumlah kegiatan	8 Jenis
Lainnya	1
RT	0
Kepengurusan	0
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
RW	0
Kepengurusan	0
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
Lainnya	0
Lembaga adat	1
Memiliki kantor/gedung/menumpang	1
Kepengurusan	1
Buku administrasi	4 Jenis
Jumlah kegiatan	4 Jenis
BUMDES	1
Memiliki kantor/gedung/menumpang	1
Kepengurusan	1
Buku administrasi	8 Jenis
Jumlah kegiatan	7 Jenis
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	1
Memiliki kantor/gedung/menumpang	1
Kepengurusan	1
Buku administrasi	1 Jenis
Jumlah kegiatan	5 Jenis
Lainnya	0
Kantor/gedung Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya	1
Memiliki kantor/gedung/menumpang	
Kepengurusan	
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada	1
Memiliki kantor/gedung/menumpang	
Kepengurusan	
Buku administrasi	Jenis

G. PRASARANA PERIBADATAN

Jumlah Pura	50 buah
-------------	---------

H. PRASARANA OLAH RAGA

Lapangan sepak bola	1 buah
Lapangan bulu tangkis	15 buah
Meja pingpong	15 buah
Lapangan voli	11 buah

I. PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN**1. Prasarana Kesehatan**

Poliklinik/balai pengobatan	1 unit
Apotik	5 unit
Posyandu	10 unit
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	10 unit
Rumah Bersalin	1 unit

2. Sarana Kesehatan

Bidan	5 orang
Perawat	11 orang

J. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Gedung SMA/sederajat	Sewa 0 buah	milik sendiri 1 buah
Gedung SMP/sederajat	Sewa 0 buah	milik sendiri 1 buah
Gedung SD/sederajat	Sewa 0 buah	milik sendiri 4 buah
Gedung TK	Sewa 0 buah	milik sendiri 1 buah
Perpustakaan desa/kelurahan	Sewa 0 buah	milik sendiri 1 buah

K. PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN

Listrik PLN	1898 unit
Diesel umum	0 unit
Genset pribadi	0 unit
Lampu minyak tanah/jarak/kelapa	0 Keluarga
Kayu bakar	0 Keluarga
Batu bara	0 Keluarga
Tanpa penerangan	0 Keluarga

L. PRASARANA HIBURAN DAN WISATA

Museum	1 buah
Restoran	5 buah
Prasarana Hiburan dan Wisata Lainnya	6 buah

M. PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN

Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	791 Lokasi
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	0 Lokasi
Alat penghancur sampah	Tidak Ada
Jumlah gerobak sampah	0 Unit
Jumlah tong sampah	791 Unit
Jumlah truck pengangkut sampah	4 Unit
Jumlah Satgas Kebersihan	0 Kelompok
Jumlah anggota Satgas Kebersihan	0 Orang
Jumlah pemulung	0 Orang
Tempat pengelolaan sampah	Tidak Ada
Pengelolaan sampah lingkungan/RT	Swasta
Pengelola sampah lainnya	Tidak Ada

KAB. GIANYAR, 11 Juli 2024

PELIATAN

Kecamatan UBUD

Kabupaten KAB. GIANYAR

PERBEKEL PEMATAN

Made Dwi Sutaryantha

Kepala Desa

Tembusan :

1. Camat UBUD
2. Bupati KAB. GIANYAR
3. Arsip



**DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: PELIATAN
Kecamatan: UBUD
Kabupaten: KAB. GIANYAR
Provinsi: BALI
Bulan: 7
Tahun: 2024

Nama Pengisi: I Nyoman Bing Sunawar
Pekerjaan: Staf Desa
Jabatan: Staf Pemerintahan

Kepala Desa / Lurah: I Made Dwi Sutaryantha

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN

UNTUK MENGISI PROFIL

DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : Kartu Keluarga

Referensi 2: APBDesa

Referensi 3: Buku Kependudukan

Referensi 4: Posyandu

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	4167 orang	4247 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	4164 orang	4234 orang
Persentase perkembangan	0.07 %	0.31 %

B. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1898 KK	0 KK	1898 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	0 KK	0 KK	0 KK
Prosentase Perkembangan	%	%	%

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	6324 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	0 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	0 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	6324 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	0 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	0 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 orang

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera	0 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	32 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	242 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	1507 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	43 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	1824 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTA IAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)

D. SUBSEKTOR PERIKANAN						
Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan
E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN						
Total nilai produksi tahun ini					Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan					Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan					Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabiskan					Rp. 0,00	
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada					0 jenis	
F. SUBSEKTOR KERAJINAN						
Total nilai produksi tahun ini					Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan					Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan					Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabiskan					Rp. 0,00	
Total jenis kerajinan rumah tangga					3 jenis	
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN						
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN						
Total nilai produksi tahun ini					Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan					Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan					Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabiskan					Rp. 0,00	
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN						
I.1. Subsektor Perdagangan Besar						
Total nilai transaksi					Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan yang ada					Rp. 0,00	
Total jumlah jenis perdagangan besar					Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Total biaya antara lainnya					Rp. 0,00	
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran						
Jumlah total jenis perdagangan eceran					228 jenis	
Total nilai transaksi					Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan eceran					Rp. 0,00	
I.3. Subsektor Hotel						
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada					127 jenis	
Jumlah total pendapatan					Rp. 0,00	
Jumlah total biaya pemeliharaan					Rp. 0,00	
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Jumlah total pendapatan yang diperoleh					Rp. 0,00	
I.4. Subsektor Restoran						
Jumlah tempat penyediaan konsumsi					9 Unit	
Biaya konsumsi yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Biaya antara lainnya					Rp. 0,00	
Jumlah total pendapatan yang diperoleh					Rp. 0,00	
J. Sektor Bangunan/Konstruksi						
Jumlah bangunan yang ada tahun ini					5 unit	
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Total nilai bangunan yang ada					Rp. 0,00	
Biaya antara lainnya					Rp. 0,00	
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan						
K.1. Subsektor Bank						
Jumlah transaksi perbankan					Rp. 0,00	
Jumlah nilai transaksi perbankan					Rp. 0,00	
Jumlah biaya yang dikeluarkan					Rp. 0,00	

K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	12 Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	12 Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.3. Subsektor Sewa Bangunan	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	0 unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	
Jumlah perusahaan jasa	0 Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	12 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
L.2. Subsektor jasa swasta	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	0 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	4 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	56 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
M.1. Subsektor Angkutan	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan	Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 0,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
N.1. Subsektor Listrik	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	0 Jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp 0,00
Jumlah total nilai transaksi	Rp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.2. Subsektor Gas	
Jumlah kegiatan penyediaan gas	2 jenis
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00
Nilai transaksi	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.3. Subsektor Air Minum	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	2 jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 0,00
Nilai produksi air minum	Rp 0,00
Nilai transaksi air minum	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00

IV. PENDAPATAN PERKAPITA**A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha**

A.1. Kerajinan	
1. Jumlah rumah tangga	12 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	36 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA

Jumlah Kepala Keluarga	KK
Jumlah Anggota Keluarga	orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 0,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 0,00

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

1. Sektor Pertanian	
Petani	0 orang
Buruh Tani	13 orang
Pemilik Usaha Tani	182 orang
2. Sektor Perkebunan	
Karyawan Perusahaan Perkebunan	orang
Buruh perkebunan	orang
Pemilik usaha Perkebunan	orang
3. Sektor Peternakan	
Peternakan Perorangan	orang
Buruh Usaha Peternakan	orang
Pemilik Usaha Peternakan	orang
4. Sektor Perikanan	
Nelayan	orang
Buruh Usaha Perikanan	orang
Pemilik Usaha Perikanan	orang
5. Sektor Kehutanan	
Pengumpul Hasil Hutan	orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	orang
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
Penambang Galian C Perorangan	orang
Buruh Usaha Pertambangan	orang
Pemilik Usaha Pertambangan	orang
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
Tukang jahit	7 orang
Tukang kue	9 orang
8. Sektor Industri Menengah dan Besar	
9. Sektor Perdagangan	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	orang
10. Sektor Jasa	
Pegawai Negeri Sipil	163 orang
POLRI	20 orang
Dokter swasta	11 orang
Bidan swasta	5 orang
Seniman/artis	50 orang
Buruh migran perempuan	1 orang
Wiraswasta lainnya	2361 orang

VI. PENGUSAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT**A. ASET TANAH**

Tidak memiliki tanah	orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	orang
Jumlah total penduduk	orang

B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM**C. ASET SARANA PRODUKSI**

Memiliki penggilingan padi	orang
Memiliki traktor	orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	orang
Memiliki kapal penangkap ikan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	orang

D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING**RUMAH MENURUT LANTAI****RUMAH MENURUT ATAP****VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA**

Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	1898 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah	791 Keluarga

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT**A. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	0 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	206 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	0 orang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat	600 orang
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat	1541 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat	369 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat	1256 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat	442 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	2883 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	467 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	809 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	71 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	10 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang

Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	0 orang

B. Wajib belajar 9 tahun

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	845 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	845 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	0 orang

C. Rasio Guru dan Murid

1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	25 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	107 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	44 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	599 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	10 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	180 orang
7. Jumlah guru SLTA/sederajat	228 orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat	30 orang
9. Jumlah siswa SLB	0 orang
10. Jumlah guru SLB	0 orang

D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	1 unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	0 unit
Jumlah perpustakaan keliling	0 unit
Jumlah sanggar belajar	5 unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	5 kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	0 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	0 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	0 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	0 orang

IX. KESEHATAN MASYARAKAT**A. Kualitas Ibu Hamil**

Jumlah ibu hamil	130 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	55 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	120 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	128 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	130 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	40 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	86 orang
Jumlah ibu nifas	86 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	86 orang

B. Kualitas Bayi

Jumlah keguguran kandungan	1 orang
Jumlah bayi lahir	86 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	86 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	1 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	5 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang

C. Kualitas Persalinan**Tempat Persalinan**

Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	4 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit
Tempat persalinan Puskesmas	0 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit

Tempat persalinan rumah praktik bidan	0 unit
Tempat praktik dokter	0 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
Pertolongan Persalinan	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
D. Cakupan Imunisasi	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	132 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	132 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	145 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	145 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	27 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	27 orang
Jumlah bayi 9 bulan	72 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	72 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	0 orang
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	
Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	384 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	2.216 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	1.282 pasangan
Keluarga Berencana	
Jumlah akseptor KB	1.010 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	168 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	474 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	121 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	155 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	11 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	59 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	22 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	272 orang
F. Wabah Penyakit	
G. Angka Harapan Hidup	
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	0,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	0,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	0,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	0,00 Tahun
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih	
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	0 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	0 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	0 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 Keluarga
Total jumlah keluarga	0 Keluarga
I. Perilaku hidup bersih dan sehat	
Kebiasaan buang air besar	
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	1.898 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	0 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	0 Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	0 Keluarga

Pola makan	
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	
Kebiasaan berobat bila sakit	
Dukun Terlatih	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Banyak
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	
Paranormal	
Obat tradisional dari keluarga sendiri	
Tidak diobati	
J. Status Gizi Balita	
Jumlah Balita	424 orang
Jumlah Balita bergizi buruk	0 orang
Jumlah Balita bergizi baik	378 orang
Jumlah Balita bergizi kurang	8 orang
Jumlah Balita bergizi lebih	38 orang
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini	
Jenis penyakit	
Jumlah penderita	
Di rawat di	
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat	
Jumlah MCK Umum	0 unit
Jumlah Posyandu	4 unit
Jumlah kader Posyandu aktif	81 orang
Jumlah pembina Posyandu	6 orang
Jumlah Dasawisma	0 Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	0 orang
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	0 orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	1 orang
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi
Buku administrasi Posyandu lainnya	15 jenis
Jumlah kegiatan Posyandu	5 jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya	81 orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	1 jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	1 jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	0 jenis
Lainnya	0 jenis
X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
A. Konflik SARA	
Kasus konflik pada tahun ini	0 kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik SARA	0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik SARA	0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik SARA	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik SARA	0 orang
Jumlah janda akibat konflik SARA	0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik SARA	0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang

B. Perkelahian	
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
C. Pencurian	
Kasus pencurian dan perampukan yang terjadi tahun ini	0 kasus
Kasus pencurian/perampukan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampukan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobatan Tanah	
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobatan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobatan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobatan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	0 orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 kasus
Jumlah pengedar Narkoba	0 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
G. Prostitusi	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
Lokalisasi prostitusi	Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktik prostitusi	0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali
H. Pembunuhan	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
I. Penculikan	
Jumlah kasus penculikan	kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	kasus
J. Kejahatan seksual	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 unit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
Jumlah gelandangan	orang
Jumlah pengemis jalanan	orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	orang

Jumlah manusia lanjut usia terlantar	orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	orang
Jumlah orang cacat fisik	orang
Jumlah orang kelainan kulit	orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	unit
Jumlah panti jompo	unit
Jumlah panti asuhan anak	unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	orang
Jumlah janda	orang
Jumlah duda	orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat	orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat	orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat	orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	orang
Jumlah penduduk eks NAPI	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekeringan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	orang

L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus

M. Teror dan Intimidasi

Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	0 kasus

N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

Organisasi Siskamling	Ada
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	0 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	30 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas	0 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	7 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	0 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	0 Pos

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT**A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara**

Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	2 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	2 kegiatan

Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	2 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	2 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus

B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi

Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	jenis
Jumlah Wajib Pajak	orang
Target PBB	Rp 0,00
Realisasi PBB	0,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar	kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	kasus

C. Partisipasi Politik

1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	6731 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	0 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	1 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	0 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	1 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	0 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	3 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	6731 pemilih

2. Pemilihan Kepala Daerah

Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	0 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	0 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu	0 pemilih

3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan

Penentuan Jabatan Kepala Desa	Dipilih masyarakat secara langsung
-------------------------------	------------------------------------

Penentuan Sekretaris Desa	
---------------------------	--

Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat
--	--

Masa jabatan Kepala Desa	8 tahun
--------------------------	---------

Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	
--	--

4. Pemilihan BPD

Jumlah anggota BPD	7 orang
Penentuan anggota BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat
Pimpinan BPD	Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
Produk keputusan BPD tahun ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa 8 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 1 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 8 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 8 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 16 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 24 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 12 kali

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	Keputusan Kepala Desa
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	9 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Keputusan Lurah
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	0 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	40 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	40 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Ada
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Ada
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	Memadai
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	100,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	Ada dan terisi
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	Berfungsi

C. PERANserta MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	1 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	100,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	70,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	30,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	0,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	100,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	100,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	100,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di	Ada

desa/kelurahan

Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	87 . kegiatan
--	---------------

Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	0 . kegiatan
--	--------------

2. Peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	5,00 %
---	--------

Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	0,00 %
--	--------

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa	12 kegiatan
--	-------------

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	0 kegiatan
---	------------

Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	100,00 %
---	----------

Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	100,00 %
---	----------

Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	100,00 %
--	----------

Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	0,00 %
---	--------

Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada
--	-----

Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Tidak
---	-------

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 kasus
---	---------

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
---	---------

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
--	---------

Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	2 Jenis
---	---------

Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	29 kegiatan
--	-------------

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	0 kegiatan
---	------------

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	2 kegiatan
---	------------

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	0 kegiatan
---	------------

3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk

Jumlah kelompok arisan	11 buah
------------------------	---------

Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	0 orang
--	---------

Ada tidaknya dana sehat	Ada
-------------------------	-----

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada
--	-----

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Ada
---	-----

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembentukan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Tidak
--	-------

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada
--	-----

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Tidak
--	-------

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengrajin sawah dan kebun	Ada
--	-----

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Tidak
--	-------

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
---	-----

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
---	-----

Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
---	-----

Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada
--	-----

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada
---	-----

4. Adat Istriadat

Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
--------------------------------	-------

Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
------------------------------------	-------

Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif
--------------------------------------	-------

Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
---------------------------------------	-------

Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
-------------------------------------	-------

Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	9999
---	------

Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Aktif
--	-------

Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Aktif
---	-------

Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif
--	-------

Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Tidak
--	-------

5. Sikap Dan Mental Masyarakat

Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
---	---------

Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
---	---------

Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	0
--	---

Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0
---	---

Semakin berkembang praktik jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
---	---

Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
---	---------

Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
---	---------

Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
---	---------

Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	0 kasus
--	---------

Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
--	---------

Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	0
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	0
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatif masyarakat sendiri	1
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	0

Etos Kerja Penduduk

Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	1
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdas	0
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	0
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	0
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	0
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	0
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	1
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	0
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	0
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	0
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	0
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	2
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	0
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	0

XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN**A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN**

Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Tidak
Jumlah kegiatan	Jenis

B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

1. LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	8 Jenis
2. PKK	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	45 Jenis
3. RUKUN WARGA	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	100 Jenis
4. KARANG TARUNA	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	15 Jenis
5. KELOMPOK TANI/NELAYAN	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	5 Jenis
6. LEMBAGA ADAT	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
7. BADAN USAHA MILIK DESA	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	5 Jenis

8. ORGANISASI KEAGAMAAN	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	10 Jenis
9. ORGANISASI PEREMPUAN LAIN	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	5 Jenis
10. ORGANISASI PEMUDA LAINNYA	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	50 Jenis
11. KELOMPOK GOTONG ROYONG	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
12. YAYASAN	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	1 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan

Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 4.750.051.000,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 2.318.388.000,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 222.000.000,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 928.720.000,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 64.000.000,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 1.163.419.000,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat	Rp 53.524.000,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 3.453.788.477,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 1.717.064.000,00

B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	0 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	0 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	0 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepada desa/lurah	0 kasus

C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Gedung Kantor	-
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	
Istri	
Air bersih	
Telepon	

1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor

Jumlah mesin tik	bah
Jumlah meja	bah

Jumlah kursi	bah
Jumlah almari arsip	bah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	unit
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	
Buku Administrasi Kependudukan	
Buku Data Inventaris	
Buku Data Aparat	
Buku Data Tanah Kas Desa	
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	
Buku Data Tanah	
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	
Buku Agenda Ekspedisi	
Buku Profil Desa dan Kelurahan	
Buku Data Induk Penduduk	
Buku Data Mutasi Penduduk	
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	
Buku Data Penduduk Sementara	
Buku Anggaran Penerimaan	
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	
Buku Kas Umum	
Buku Kas Pembantu Penerimaan	
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Gedung Kantor	
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai BPD	-
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	bah
Jumlah meja	bah
Jumlah kursi	bah
Jumlah almari arsip	bah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
2.B. Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	
Buku kegiatan BPD	
Buku himpunan peraturan desa	
Buku Lainnya	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jenis kegiatan	Jenis
Jumlah pengurus	Orang
Jumlah ruang kerja	Ruang
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD	
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	

Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akseleksi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	kali

2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	1
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	1
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	1
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	1
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	0 kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 jenis

3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	kasus

4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan

Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	kali

Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlomba dan pasca perlombaan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	kali

KAB. GIANYAR, 11 Juli 2024

PELIATAN

Kecamatan UBUD

Kabupaten KAB. GIANYAR

Made Dwi Sutaryantha
Kepala Desa

Tembusan :

1. Camat UBUD
2. Bupati KAB. GIANYAR
3. Arsip



[Handwritten signature over the stamp]